

UNIVERSITAS INDONESIA

**TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN JEPANG DALAM
DUNIA KERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PENINGKATAN PENUNDAAN USIA MENIKAH
(*BANKONKA*)**

SKRIPSI

SISCA ELLYANTO

0806354535

**PROGRAM STUDI JEPANG
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK
JULI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINGKAT PARTISIPASI PEREMPUAN JEPANG DALAM
DUNIA KERJA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
PENINGKATAN PENUNDAAN USIA MENIKAH
(*BANKONKA*)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana

SISCA ELLYANTO

0806354535

**PROGRAM STUDI JEPANG
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA**

DEPOK

JULI 2012

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 10 Juli 2012



Sisca Ellyanto

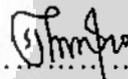


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

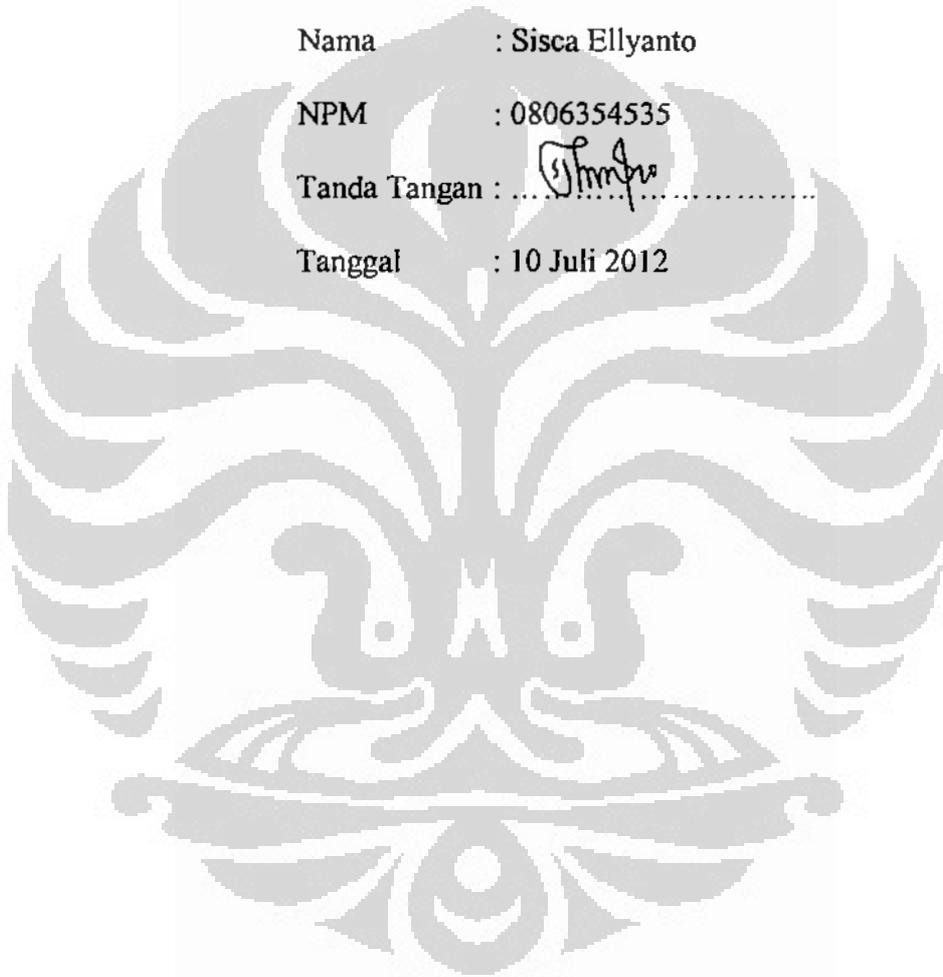
Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sisca Ellyanto

NPM : 0806354535

Tanda Tangan : 

Tanggal : 10 Juli 2012



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Sisca Ellyanto
NPM : 0806354535
Program Studi : Jepang
Judul Skripsi : Tingkat Partisipasi Perempuan Jepang dalam
Dunia Kerja dan Hubungannya dengan
Peningkatan Penundaan Usia Menikah (*Bankonka*)

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

TIM PENGUJI

Pembimbing : Yenny Simulya, M.A. (... Jenny)
Penguji : Ermah Mandah, M.A. (... Ermah)
Penguji : Dr. Etty Nurhayati Anwar (... Etty)
Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 10 Juli 2012

Oleh
Dekan
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia



Dr. Bambang Wibawarta S.S, M.A
NIP. 19651023 199003 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dari banyak pihak, penulisan skripsi ini tidak dapat selesai tepat waktu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

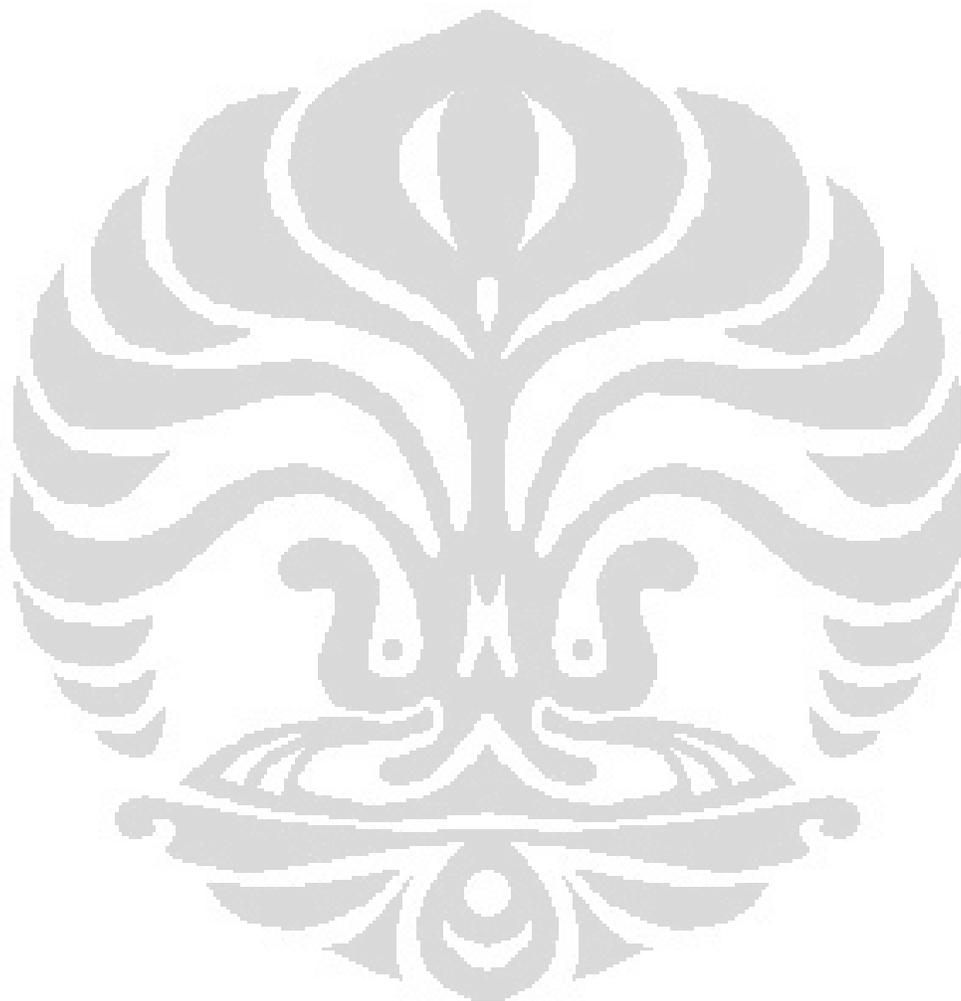
1. Ibu Yenny Simulya, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ermah Mandah dan Ibu Etty Nurhayati Anwar, selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik bagi kebaikan skripsi ini.
3. Koordinator dan seluruh dosen Program Studi Jepang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama empat tahun ini kepada penulis.
4. Kedua orang tua penulis, Ibunda Lili Fauziah dan alm. Ayahanda Edy Yanto, yang selalu memberi dukungan dan doa yang tidak pernah putus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini hanyalah balasan kecil untuk segala pengorbanan Ibu dan Ayah.
5. Keluarga besar penulis yang tak henti memberikan doa dan dukungan.
6. Sahabat tercinta, Citra Melati Putri, yang selalu memberikan dukungan dan hiburan kepada penulis sehingga penulis tidak putus asa untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman SINTESA yang telah menjadi saudara seperantauan dan telah memberikan limpahan dukungan kepada penulis.
8. Teman-teman Nihongakka 2008, terimakasih atas kenangan yang kalian berikan selama empat tahun ini. Terutama bagi Hanna Frisca Chesyta Zihni dan Roslina Fauziah. Kalianlah yang membuat hari-hari di kampus terasa lebih menyenangkan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari skripsi ini, untuk itu saran dan kritik adalah hal berharga yang penulis harapkan demi

perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 10 Juli 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisea Ellyanto
NPM : 0806354535
Program Studi : Jepang
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tingkat Partisipasi Perempuan Jepang dalam Dunia Kerja dan
Hubungannya dengan Peningkatan Penundaan Usia Menikah (*Bankonka*)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 10 Juli 2012

Yang menyatakan



(Sisca Ellyanto)

ABSTRAK

Nama : Sisca Ellyanto
Program Studi : Jepang
Judul : Tingkat Partisipasi Perempuan Jepang dalam Dunia Kerja dan Hubungannya dengan Peningkatan Penundaan Usia Menikah (*Bankonka*)

Penelitian ini menganalisis mengenai tingkat partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja dan kaitannya dengan *bankonka* di Jepang. Jumlah *bankonka* di Jepang terus mengalami peningkatan dan salah satu penyebabnya adalah meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki dunia kerja. Pada masa sebelum perang, perempuan hanya bekerja sebagai *kazoku roudousha* (pekerja keluarga) dan tidak memperoleh penghasilan. Namun, hal tersebut berubah setelah masa Perang Dunia II, jumlah perempuan yang menjadi *koyousha* (pegawai) pun meningkat. Dengan meningkatnya *koyousha*, perempuan pun menjadi semakin mandiri secara finansial. Hal ini menyebabkan perempuan enggan untuk menikah karena mereka dapat menghidupi diri mereka sendiri dan mereka tidak ingin kehilangan kebebasan. Hasilnya, mereka lebih memilih karir daripada membangun sebuah keluarga dan jumlah *bankonka* pun meningkat.

Kata kunci:

Bankonka, perempuan, pernikahan, tenaga kerja.

ABSTRACT

Name : Sisca Ellyanto
Study Program : Japan
Title : Japanese Women's Participation Rate in Labor Force and Its Relation to the Improvement of the Postponement of Marriage Age (*Bankonka*)

This research analyzed the rate of participation of Japanese women in the labor force and its relation to *bankonka* in Japan. The number of *bankonka* in Japan is increasing and one of the reasons is the increasing of the number of working women. In the period before the war, women worked just as *kazoku roudousha* (family workers) and they have no income. However, this condition changed after World War II, the number of women who become *koyousha* (wage employee) increases. By the increasing of *koyousha*, women became more financially independent. This causes women are reluctant to marry because they can sustain themselves and they do not want to lose their freedom. Thus, they prefer career instead to build a family and the number of *bankonka* increases.

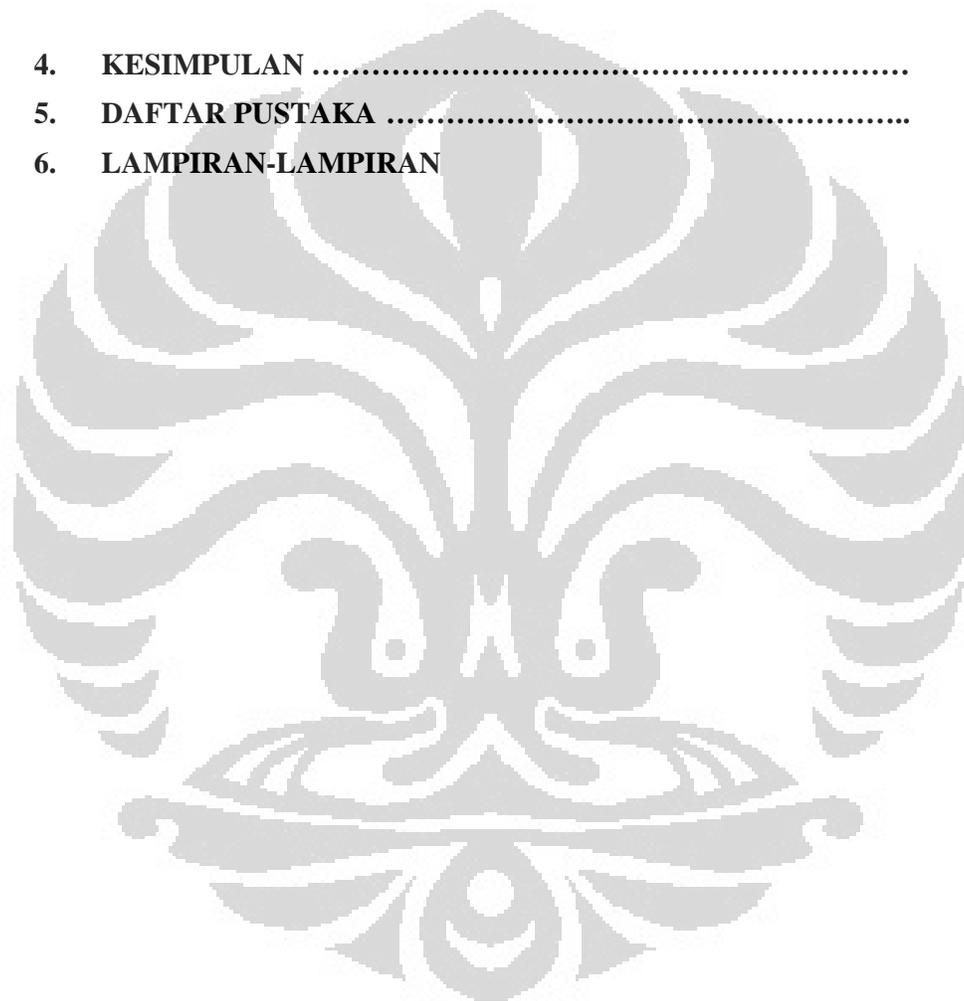
Key words:

Bankonka, women, marriage, labor force.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Plagiarisme.....	ii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Kata Pengantar	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah.....	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Lampiran	xii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
2. FENOMENA <i>BANKONKA</i> DI JEPANG	6
2.1 Definisi dan Alasan <i>Bankonka</i>	6
2.2 Faktor-Faktor Penyebab <i>Bankonka</i>	10
2.2.1 Perubahan Pandangan terhadap Pernikahan	10
2.2.1.1 Sebelum Perang Dunia II	10
2.2.1.2 Setelah Perang Dunia II	15
2.2.2 Terbukanya Kesempatan bagi Perempuan untuk Mendapat Pendidikan.....	19
2.2.3 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja..	25
2.3 Gambaran <i>Bankonka</i> di Jepang.....	30

3. PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA	35
3.1 Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Sebelum Tahun 1985	35
3.1.1 Pada Masa Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (1955-1973)....	35
3.1.2 Pada Masa Pertumbuhan Ekonomi Rendah (setelah 1973)	38
3.2 Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Setelah Tahun 1985..	42
3.3 Hubungan antara Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja dengan <i>Bankonka</i>	49
4. KESIMPULAN	55
5. DAFTAR PUSTAKA	57
6. LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Tabel

Tabel 1: Usia Rata-Rata pada Pernikahan Pertama

Tabel 2: Jumlah Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Usia dan Industri

Tabel 3: Persentase Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Usia

Tabel 4: Persentase Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Pendidikan

Tabel 5: Persentase Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Status Pernikahan

Tabel 6: Persentase Tenaga Kerja Perempuan yang Menempati Posisi Manajerial

Lampiran Grafik

Grafik 1: Persentase Perempuan yang Belum Menikah berdasarkan Usia

Grafik 2: Perubahan *Mi'ai Kekkon* dan *Ren'ai Kekkon*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masyarakat Jepang di zaman Meiji, pernikahan dianggap sebagai kebahagiaan perempuan sehingga jika ada perempuan yang belum menikah pada usia yang ditentukan (*kekkon tekireiki*), maka akan timbul tekanan sosial, baik dari orang tua ataupun masyarakat sekitar. Pada masa ini pernikahan dilakukan bukan atas kehendak individu, melainkan wewenang kepala keluarga (*kachou*) sehingga pernikahan yang banyak terjadi pada masa ini adalah *mi'ai kekkon*. Perempuan pun dituntut menjadi *ryousai kenbo* (istri yang baik dan ibu yang bijaksana). Pandangan *ryousai kenbo* tersebut secara tidak langsung telah mempengaruhi pendidikan perempuan dimana mereka hanya mendapat pendidikan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan, seperti menyulam dan menjahit.

Pada masa ini partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja cukup tinggi, tetapi tempat di mana mereka dapat bekerja masih dibatasi. Sebagian besar dari mereka bekerja di bidang pertanian, industri kerajinan tangan, atau pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak memerlukan keahlian dan keterampilan khusus. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan adalah jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan tetap mengawasi anak-anak mereka dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga (Iwao, 1993:154).

Namun, pada masa setelah Perang Dunia II, dengan dihapuskannya sistem *ie*¹ dan adanya Undang-Undang Perdata Baru yang menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, maka jumlah *mi'ai kekkon* pun berkurang dan jumlah *ren'ai kekkon* terus meningkat. Selain jumlah *mi'ai kekkon* yang semakin berkurang, jumlah perempuan yang setuju dengan

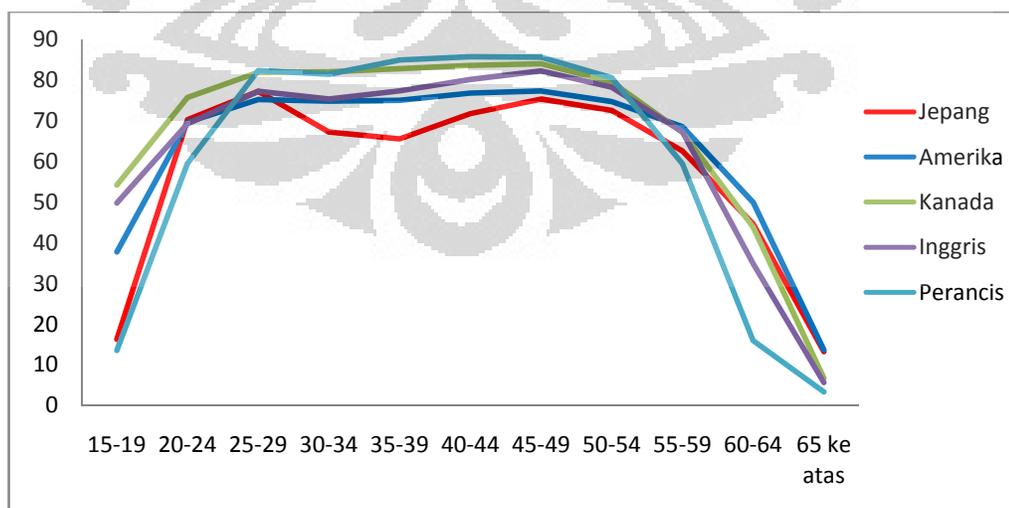
¹ Sistem *ie* merupakan sistem keluarga di Jepang yang mengatur kehidupan anggota-anggotanya yang sekerabat bukan hanya dalam hubungan kekerabatan saja, tetapi juga dalam bidang ekonomi maupun sosial (Tobing, 2006: 74). Sistem *ie* dihapuskan sejak ditetapkannya Undang-Undang Showa (*Nihon Koku Kenpou*) pada tahun 1946. Namun, dalam kenyataannya sistem *ie* masih berperan dalam masyarakat Jepang. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluarga yang mementingkan kesinambungan garis keturunan keluarga dan berharap untuk memiliki anak laki-laki (*Ibid*, hal. 6).

pernyataan “pernikahan adalah kebahagiaan perempuan” pun turut mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan nilai pernikahan telah berubah di mata perempuan Jepang.

Selain itu, pendidikan perempuan mulai mengalami perubahan terutama setelah diterapkannya Undang-Undang Dasar Pendidikan (*kyou'iku kihon hou*) tahun 1947. Dalam undang-undang tersebut terdapat aturan yang menjamin persamaan hak untuk mendapat pendidikan. Hasilnya, perempuan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi pun meningkat. Dengan meningkatnya pendidikan perempuan, jumlah perempuan yang memasuki dunia kerja pun mengalami peningkatan, terutama lulusan universitas.

Partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja dapat digambarkan melalui kurva M. Dari Grafik 1 dapat terlihat bahwa di antara negara maju lainnya, hanya Jepang yang kurvanya berbentuk M sedangkan negara-negara lainnya berbentuk kurva U. Hal ini dikarenakan tenaga kerja utama perempuan adalah mereka yang berusia 20-an, tetapi saat mencapai usia 30 tahun, mereka akan berhenti bekerja karena menikah ataupun melahirkan. Lalu, mereka akan kembali bekerja saat mencapai usia 35 tahun ke atas, yaitu saat anak-anak mereka sudah mencapai usia sekolah. Kurva kembali menurun di usia 50-an karena tuntutan usia yang mengharuskan mereka untuk berhenti bekerja.

Grafik 1 - Persentase Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja (2009)



Catatan: 1. Data diambil dari ILO LABORSTA (Januari 2011)

2. untuk tenaga kerja perempuan Amerika dan Inggris adalah yang berusia 16-19 tahun.

Dalam dunia bisnis, perempuan Jepang bukanlah pemain utama, tetapi hanya sebagai pemain pendukung (*supporters*) yang membantu pekerjaan laki-laki. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan klerikal seperti mengangkat telepon dan membuat teh. Namun, sejak diterapkannya 男女雇用機会均等法 (*danjo koyou kikai kintouhou*) atau *Equal Employment Opportunity Law (EEOL)* pada tahun 1985, perempuan mulai mendapat kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam hal pekerjaan. Dengan diterapkannya hukum tersebut, partisipasi perempuan dalam dunia kerja pun meningkat. Antara tahun 1975 dan 1995, presentase perempuan yang bekerja pada usia 20-24 tahun dan 25-29 tahun meningkat dari 66% menjadi 74% dan dari 43% menjadi 66% (Biro Statistik, 1996).

Selain itu, setelah diterapkannya EEOL, diperkenalkan dua sistem jalur kerja, yaitu *ippan shoku* (一般職) dan *sougou shoku* (総合職). Jalur *sougou shoku* merupakan jalur karir di mana perempuan dapat memperoleh jabatan manajer dan memperoleh promosi seperti halnya laki-laki dan perempuan yang memilih jalur ini biasanya memiliki pendidikan yang tinggi, sedangkan jalur *ippanshoku* merupakan jalur di mana kesempatan untuk promosi dibatasi dan tidak adanya jaminan yang jelas seperti pekerja yang memilih jalur *sougou shoku*.

Bagi perempuan yang memprioritaskan pekerjaan, menikah dan memiliki anak adalah suatu halangan bagi karir mereka. Perempuan Jepang tidak lagi menganggap menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang penting bagi mereka, apalagi bagi perempuan yang tinggal di daerah perkotaan yang memiliki minat dengan kegiatan *outdoor* dan memiliki banyak aktifitas. Mereka lebih memilih untuk mengejar karir daripada menikah dan membangun sebuah keluarga.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja mempengaruhi penundaan usia menikah.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang hubungan antara partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja dan peningkatan penundaan usia menikah (*bankonka*) di Jepang.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan teknik penulisan deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelaahan pustaka. Sumber yang digunakan meliputi buku teks dan publikasi elektronik. Adapun sumber-sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Pusat Studi Jepang, Perpustakaan *The Japan Foundation*, dan bahan kuliah yang pernah penulis ikuti.

1.5 Sistematika Penulisan

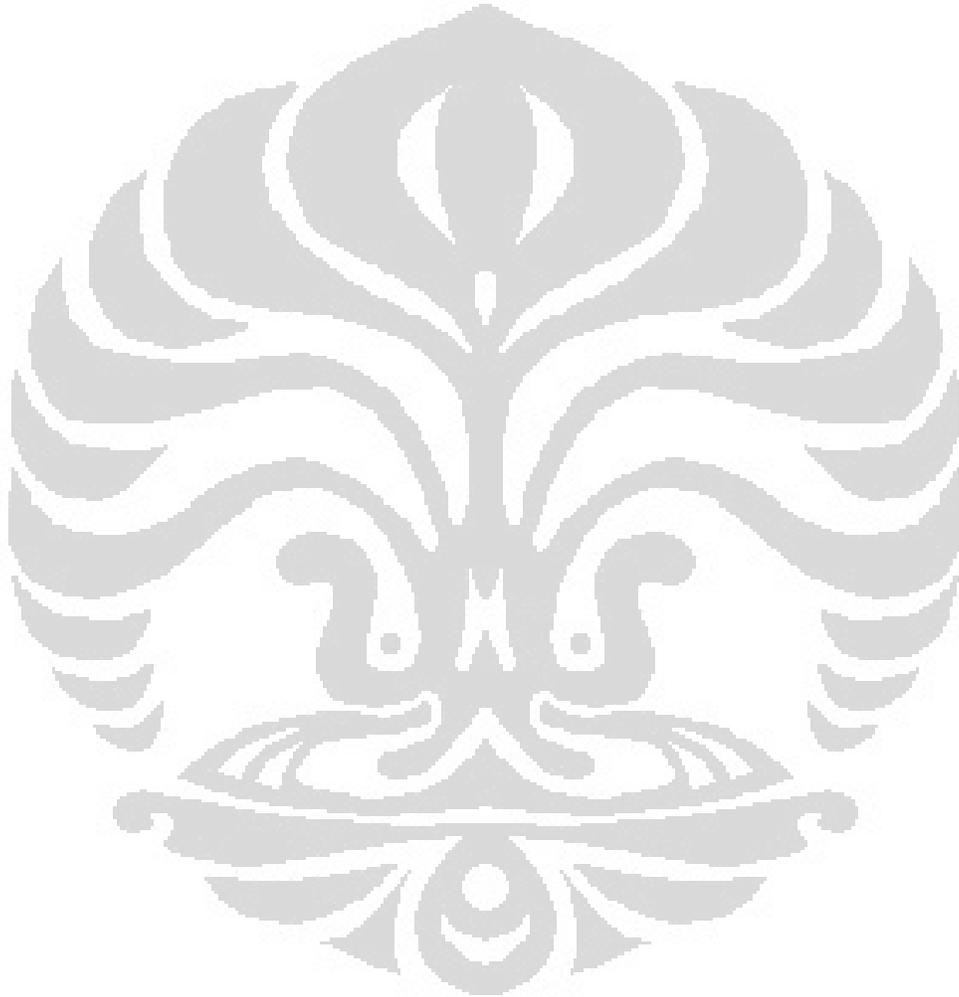
Skripsi ini disusun dalam empat bab dengan urutan sebagai berikut, satu bab pendahuluan, satu bab penjelasan tentang *bankonka*, satu bab deskripsi umum tentang peran perempuan Jepang dalam dunia kerja, dan satu bab kesimpulan.

Dalam bab satu diuraikan tentang gambaran umum penelitian ini. Di akhir bab satu, penulis menambahkan subbab perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dilakukannya penelitian ini, metode yang dilakukan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua membahas tentang pengertian *bankonka*, faktor penyebab *bankonka*, dan gambaran umum *bankonka* di Jepang.

Dalam bab tiga akan dijelaskan mengenai partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja sejak Jepang mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi hingga sekarang dan pengaruh diterapkannya *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL) terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di Jepang. Di akhir bab ini akan dijelaskan pula mengenai kaitan antara *bankonka* dan tingginya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Bab empat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dari skripsi ini.



BAB 2

FENOMENA *BANKONKA* DI JEPANG

2.1 Definisi dan Alasan *Bankonka*

Kata *bankonka* terdiri dari tiga kanji, yaitu *ban* (晩 – malam); *kon* (婚 - pernikahan); dan *ka* (化 - perubahan). Jadi, secara literal, *bankonka* dapat diartikan sebagai gejala penundaan pernikahan. Sedangkan menurut *josei gaku jiten* (女性学事典- *encyclopedia of women's studies*), yang dimaksud dengan *bankonka* adalah sebagai berikut:

結婚適齢期とされる年齢層、または結婚が比較的頻繁に生じている年齢範囲よりも高い年齢での結婚が相対的に増加する傾向。

Kekkon tekireiki to sareru nenreisou, mata ha kekkon ga hikakuteki hinpan ni shoujiteiru nenrei han'i yori mo takai nenrei de no kekkon ga sountaiteki ni zoukasuru keikou.

Terjemahan:

“Pernikahan pada usia yang lebih tinggi daripada usia ideal untuk menikah cenderung semakin bertambah.”

Pendapat lain tentang pengertian *bankonka*, yaitu:

平均初婚年齢は男女共に上昇傾向にある。¹

Heikin shokon nenrei ha danjo tomoni joushou keikou ni aru.

Terjemahan:

“Usia rata-rata pada pernikahan pertama, baik pada laki-laki maupun perempuan, cenderung mengalami kenaikan.”

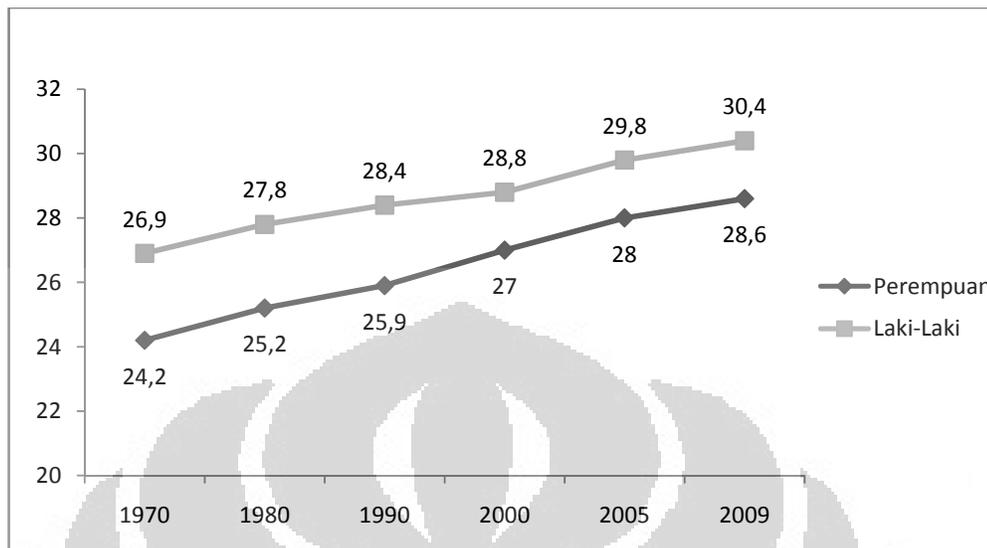
¹ Takeuchi Junichirou. “Bankonka-Hikonka no Haigo ni, yori Shinkoku na Dansei Jakunensou no (teikonka) ari”. *Japan Center for Economic Research* (2011).

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *bankonka* merujuk pada pernikahan yang telah melewati waktu yang tepat untuk menikah dan waktu yang tepat untuk menikah tersebut mengalami perubahan setiap tahunnya. Selain itu, penundaan pernikahan tidak hanya terjadi pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki. Namun, karena perubahan yang signifikan terjadi pada perempuan, maka yang menjadi fokus pada skripsi ini adalah penundaan pernikahan yang terjadi pada perempuan.

Meskipun di Jepang, berdasarkan Undang-Undang Perdata Jepang, laki-laki diperbolehkan untuk menikah pada usia 18 tahun dan perempuan pada usia 16 tahun, tetapi karena semakin banyaknya penduduk Jepang yang melanjutkan sekolah ke SMA (55.9% pada tahun 1960 menjadi 96.2% pada tahun 1990) dan bahkan ke universitas (2.5% pada tahun 1960 menjadi 15.2% pada tahun 1990), maka hampir tidak ada yang menikah pada usia tersebut. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penduduk yang belum menikah pada usia tersebut. Pada tahun 1960, jumlah penduduk (laki-laki dan perempuan) yang belum menikah pada kelompok usia 15-19 tahun adalah 4.704.144 sedangkan pada tahun 1990 jumlah tersebut meningkat menjadi 5.045.638. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk yang belum menikah kelompok usia 20-24 meningkat dari 3.810.241 menjadi 4.118.695 (Statistic of Japan, 1920-2005).

Penundaan pernikahan ini dapat dilihat dari *mean age at the first marriage* (MAFM), yaitu usia rata-rata pada pernikahan pertama. Dari Grafik 2.1 dapat dilihat bahwa usia rata-rata pada pernikahan pertama, baik laki-laki maupun perempuan, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 1970, MAFM perempuan Jepang adalah 24.2 tahun; tahun 1990 menjadi 25.9 tahun; dan 28.6 tahun pada tahun 2009 sedangkan MAFM laki-laki, pada tahun yang sama, adalah 26.9 tahun, 28.4 tahun, dan 30.4 tahun. Dari tahun 1970-2009 peningkatan usia pada perempuan adalah 4.4 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 3.5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan MAFM lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki.

Grafik 2.2 – Usia Rata-Rata pada Pernikahan Pertama



Sumber: Ministry of Health, Labor, and Welfare (2010)

Berdasarkan *National Survey of Family Planning* (1998), alasan perempuan menunda pernikahan adalah ingin melanjutkan sekolah/pekerjaan (38.3%); tidak menemukan pasangan yang tepat (31.6%); akan kehilangan kebebasan jika menikah (29.5%); ingin melakukan hobi (19.4%); masalah finansial (12.7%). Sedangkan berdasarkan *Journal of Population Problems* (2002), alasan *bankonka* adalah sebagai berikut:

1. 非婚志向によるもの：「人生にとってかならずしも結婚を必要としない」「独身の方が自由」など、結婚しなくても良いのではないかという考え方である。

Hikon shikou ni yoru mono: "jinsei ni totte kanarazushimo kekkon wo hitsuyou to shinai" "dokushin no hou ga jiyuu" nado, kekkon shinakutemo yoi no de ha naika to iu kangae kata de aru.

2. 経済的問題などの条件的制約：結婚の意思があるが、収入面における制約や仕事をやめたくないなど結婚への阻害要因によって、結婚を遅らせざるを得ないというものである。

Keizai teki mondai nado no jouken teki seiyaku: kekkon no ishi ga aru ga, shuunyuu men ni okeru seiyaku ya shigoto woyametakunai nado kekkon he no sougai you'in ni yotte, kekkon wo okurasezaru wo enai to iu mono de aru.

3. 相手が見つからない：異性への要求水準が高くなりすぎ、理想の相手を見つけることを難しい状態を示す。

Aite ga mitsukaranai: isei he no youkyuu suijun ga takakunarisugi, risou no aite wo mitsukeru koto wo muzukahii joutai wo shimesu.

Terjemahan:

1. Ada kecenderungan untuk tidak menikah: adanya pikiran bahwa tidak masalah jika tidak menikah, seperti “dalam kehidupan manusia, tidak selamanya pernikahan itu penting”, “hidup lajang itu bebas”, dan lain-lain.
2. Adanya batasan dalam masalah ekonomi dan lain-lain: ada keinginan untuk menikah, tetapi tidak ingin berhenti bekerja. Hal ini menjadi halangan untuk menikah dan akhirnya memilih untuk menunda pernikahan.
3. Tidak menemukan pasangan: standard pemilihan pasangan yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk menemukan pasangan yang tepat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa meningkatnya *bankonka* dapat dilihat dari semakin tingginya usia rata-rata pada pernikahan pertama dan alasan *bankonka* adalah karena perempuan tidak ingin kehilangan kebebasan serta tidak ingin berhenti bekerja. Dengan tetap menjadi lajang, mereka tidak memiliki kewajiban/tanggung jawab mengurus keluarga dan dapat memiliki hubungan pertemanan yang luas. Selain itu, mereka tidak ingin berhenti bekerja karena jika mereka harus berhenti bekerja, maka mereka tidak akan mendapat penghasilan dan hanya bergantung pada suami. Ditambah pula perempuan Jepang masa kini memiliki standard yang cukup tinggi dalam memilih pasangan sehingga sulit bagi mereka untuk menemukan pasangan yang tepat. Tingginya standard pemilihan pasangan dikarenakan pendidikan perempuan yang semakin maju dan mereka lebih memilih untuk menunggu hingga menemukan pasangan yang tepat daripada harus menikah dengan orang yang tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan.

2.2 Faktor-Faktor Penyebab *Bankonka*

Fenomena *bankonka* yang terjadi di Jepang dilatarbelakangi oleh beberapa hal, antara lain perubahan pandangan terhadap pernikahan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mendapat pendidikan hingga perguruan tinggi, dan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

2.2.1 Perubahan Pandangan terhadap Pernikahan

Pandangan perempuan Jepang terhadap pernikahan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan. Perubahan ini terlihat pada masa sesudah Perang Dunia II di mana pada masa sebelum Perang Dunia II pernikahan dianggap sebagai kebahagiaan perempuan sehingga pernikahan menjadi suatu keharusan bagi perempuan. Sedangkan pada masa setelah Perang Dunia II, pernikahan tidak lagi dianggap sebagai suatu keharusan dan perempuan memiliki kebebasan untuk memilih antara menikah atau pun tidak menikah.

2.2.1.1 Sebelum Perang Dunia II

Pada masa ini, pernikahan dinilai sebagai kebahagiaan perempuan. Sejak dini, telah ditanamkan dalam benak setiap anak perempuan bahwa pernikahan adalah kebahagiaan bagi mereka sehingga mereka pun tumbuh dengan pemikiran tersebut: bahwa pernikahan akan membawa kebahagiaan bagi mereka. Hal ini terlihat dari adanya ungkapan 「女の幸せは早くいい男を見つけて結婚すること」 “*onna no shiawase ha hayaku ii otoko wo mitsukete kekkon suru koto*”, yaitu “kebahagiaan perempuan adalah menemukan dan menikah dengan laki-laki yang baik secepatnya”. Meskipun banyak pula laki-laki yang merasa bahagia menikah dengan perempuan yang baik, tetapi tidak ada ungkapan “pernikahan adalah kebahagiaan laki-laki”. Hal ini dikarenakan dunia laki-laki tidak terbatas hanya pada pernikahan, tetapi juga sekolah, seni, pekerjaan, pemerintahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “pernikahan adalah kebahagiaan perempuan” adalah perempuan tidak memiliki dunia lain

selain pernikahan dan keluarga. Dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang sewajarnya.²

Pernikahan pada masa sebelum perang dipengaruhi oleh sistem *ie* di Jepang, yaitu:

“戦前の家制度社会では、結婚は家の繁栄の手段とされ、結婚相手方の家柄が重視され、配偶者選択は本人の意思よりも家長の権限で決められ、親類や知人の紹介により見合い結婚が主流であった”³

Senzen no ieseido shakai de ha, kekkon ha ie no han'ei no shudan to sare, kekkon aite kata no iegara ga juushi sare, haiguusha sentaku ha honnin no ishi yori mo kachou no kengen de kimerare, shinrui ya chijin no shoukai ni yori mi'ai kekkon ga shuryuu de atta.

Terjemahan:

“Pada sistem *ie* di masa sebelum perang, pernikahan dilakukan demi kemakmuran *ie*. Oleh karena itu, status dan asal-usul pasangan adalah sesuatu yang penting dan pemilihan pasangan tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi dilakukan oleh kepala keluarga. Oleh karena itu, pernikahan pada masa itu pada umumnya adalah *mi'ai kekkon* melalui perantara kerabat dekat.”

Pada masa itu, pernikahan dilakukan untuk keberlangsungan dan kemakmuran *ie* dan karena pada sistem *ie* kekuasaan *kacho* (kepala keluarga) adalah sesuatu yang mutlak, maka pemilihan pasangan merupakan wewenang *kachou*. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki hak atau kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Selama periode perang, sebagai contoh, hampir 70% pernikahan di Jepang diatur oleh orang tua.⁴

Dengan diberlangsungkannya suatu pernikahan bukan berarti terbentuk *ie* baru, tetapi lebih pada pindahannya sang istri ke *ie* suami. Hal ini ditandai dengan

² Satou Nobuko. *Josei Gaku*. (Japan:1999). Hal.135-136

³ Inoue Teruko. *Women's Data Book*. (Japan:2005). Hal. 12

⁴ Kumagai Fumie. *Unmasking Japan Today*. (London:1996). Hal.22

berubahnya *myoji* (nama keluarga) istri mengikuti *myoji* suami. Dengan berubahnya *myoji* perempuan, maka dia tidak lagi terdaftar dalam *ie* keluarganya. Berubahnya *myoji* istri mengikuti *myoji* suami merupakan simbol kebahagiaan perempuan dan mereka memiliki kepercayaan diri sebagai perempuan. Alasan mereka dengan tanpa ragu merubah nama keluarga mereka antara lain, “Karena saya menyukainya dan ingin dipanggil dengan nama keluarganya”, “Ketika merubah *myouji* ada perasaan telah menjadi suami-istri”, dan lain-lain (Satou Nobuko, 1999:139). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang penting bagi perempuan, bahkan saat *myoji*-nya harus berubah pun perempuan tidak merasa keberatan. Dengan berubahnya nama keluarga yang telah dia sandang sejak kecil ketika dia telah memiliki suami justru menjadi simbol kebahagiaan dan kepercayaan diri bagi perempuan. Karena dengan berubahnya *myoji* tersebut, menunjukkan bahwa dia tidak lagi menjadi *dokushin* dan dia tidak lagi mendapat tekanan dari orang tua atau pun masyarakat.

Dengan adanya pandangan bahwa pernikahan adalah kebahagiaan perempuan, maka perempuan pun ingin menikah saat muda. Selain karena hal tersebut, terdapat pula pandangan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan pada ketika perempuan masih muda karena pada saat itu perempuan memiliki daya tawar yang tinggi. Hal inilah yang disebut dengan *kekkon tekireiki* (usia yang tepat untuk menikah).

Pada masa sebelum perang, usia yang tepat bagi perempuan untuk menikah adalah 20-24 tahun. Jika mereka telah mencapai usia tersebut, tetapi belum juga menikah, mereka akan mendapat tekanan, baik dari orang tua atau masyarakat, untuk segera menikah. Perempuan yang belum menikah akan mendapat tekanan halus dari ibu, yaitu sang ibu akan menjahitkan pakaian (*kimono*) agar si anak mempunyai keinginan untuk menikah dan untuk digunakan saat pernikahan sang anak. Lebra (1984) mengemukakan bahwa tekanan yang berasal dari masyarakat berupa penilaian bahwa ada sesuatu yang salah pada diri si perempuan jika dia belum menikah sesuai dengan *kekkon tekireiki*:

“... *The daughter's life is incomplete without marriage, but the gossip goes still further: she can not marry because there is*

something wrong with her... She hates the idea of marriage, but feels compelled to marry once so that she can demonstrate her physical normality.”

Terjemahan:

... Kehidupan anak perempuan tidak akan lengkap tanpa pernikahan, tetapi gunjingan terus berlanjut: dia tidak dapat menikah karena ada sesuatu yang salah pada dirinya ... Dia tidak suka dengan gagasan tentang pernikahan, tetapi merasa terpaksa menikah untuk menunjukkan kenormalan fisiknya.

Dari tulisan Lebra di atas dapat diketahui bahwa masyarakat akan menilai bahwa perempuan tersebut memiliki penyakit atau ketidaknormalan pada fisiknya yang menyebabkan dirinya belum menikah. Hal ini membuat perempuan terpaksa menikah untuk membuktikan bahwa tidak ada yang salah pada dirinya. Hasilnya, jumlah pernikahan pun meningkat, yaitu dari 325.141 pada tahun 1890 menjadi 346.528 pada tahun 1990 (Summary of Vital Statistic, 2005).

Saat seorang perempuan mencapai usia 25 tahun dan belum menikah, maka dia akan disebut *urenokori* (barang yang tidak terjual) atau *tou ga tatsu* (buah yang terlalu masak). Hal ini dikarenakan pada masa itu, pernikahan adalah suatu keharusan.⁵ Selain disebut *urenokori* atau *tou ga tatsu*, mereka juga disebut *クリスマスケーキ* (*Christmas cake*). Mereka disebut demikian karena dianggap sama dengan *christmas cake* yang tidak akan laku dijual setelah tanggal 25 Desember.

Pada era Meiji (1868-1912) muncul pandangan 良妻賢母⁶ (*ryousai kenbo* – istri yang baik dan ibu yang bijaksana) dan secara tidak langsung pandangan

⁵ Sumiko Iwao. *Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*. (New York: 1993). Hal. 59.

⁶ Pada masa Meiji, untuk pertama kalinya definisi tentang ‘keperempuanan’ dianggap sebagai bagian dari terminologi ‘keibuan’ mendapatkan legitimasi, tidak peduli seorang perempuan itu adalah seorang ibu atau bukan. Di sini, kaum perempuan boleh dikatakan baru sekadar mencapai kedudukan berderajat tertentu, yaitu sebagai ‘ibu’, dan dengan demikian ini bukan merupakan bentuk pengakuan terhadap hak mereka sebagai perempuan, tetapi lebih banyak sebagai akibat penghargaan bagi fungsi sosial perempuan dalam melahirkan serta membesarkan para calon pengganti kepala keluarga (Wulandari, *Domestikasi Perempuan Melalui Doktrin Ryouisaikenbo*, hal. 4)

ryousai kenbo ini membatasi peran perempuan, yaitu hanya sebagai istri dan ibu. Banyak perempuan yang bekerja, tetapi seberapa besar pun kontribusi mereka, pekerjaan mereka sama sekali tidak berhubungan dengan aktualisasi diri. Pekerjaan tersebut hanya sekedar membantu suami sebagai pencari nafkah. Sebagian besar dari mereka hanya bekerja sebagai *kazoku roudousha* (pekerja untuk keluarga) dan tidak memiliki penghasilan.

Wulandari, dalam tulisannya yang berjudul *Domestikasi Perempuan Melalui Doktrin Ryousaikenbo: Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah Meiji*, mengatakan bahwa gagasan tentang *ryousai kenbo* ini merupakan pendukung praktis bagi ideologi resmi yang beranggapan bahwa kaum istri yang baik dan para ibu yang bijaksana adalah mereka yang menyesuaikan diri dengan kehidupan kaum laki-laki yang secara setia dan patriotis melaksanakan tugas negara. Melalui gagasan ini pula, pemerintah mempromosikan satu bentuk ‘keluarga’/struktur rumah tangga tertentu, yaitu laki-laki pencari nafkah, dengan istri dan anak-anak yang bergantung pada suami/laki-laki.

Urusan rumah tangga dan mengurus anak merupakan tanggung jawab istri dan semua pekerjaan rumah tangga tersebut dia lakukan sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Ada pandangan bahwa di rumah istri pun melakukan pekerjaan yang sama pentingnya dengan suami yang bekerja di luar untuk mencari nafkah. Jadi, melakukan pekerjaan rumah tangga adalah hal yang mulia bagi seorang istri. Karena pada masa itu apa yang dipikirkan perempuan tentang *ryousai kenbo* tidak terlalu berbeda dengan apa yang diperkirakan oleh laki-laki sehingga jarang terjadi konflik akan pembagian peran antara suami dan istri. Sebagian besar laki-laki bahkan dengan bangga mengatakan bahwa mereka jarang membantu urusan rumah tangga dan mereka memiliki otoritas dalam keluarga.⁷

Di dalam *ie* terdapat banyak perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Perempuan diharuskan melahirkan anak laki-laki sebagai penerus sistem *ie* dan perempuan tidak boleh memikirkan kepentingannya sendiri, dia harus mendahulukan kepentingan keluarga dan *ie*. Kebebasan perempuan semakin hilang dengan adanya ajaran Konfusianisme tentang “tiga kepatuhan perempuan”,

⁷ Kumagai. *Op. Cit.* Hal.20

yaitu perempuan harus patuh pada ayahnya saat muda, patuh pada suami ketika telah menikah, dan patuh pada anak setelah memiliki anak. Hal ini menyebabkan perempuan tidak memiliki kebebasan dan mereka harus merelakan kebebasan dan segala keinginan demi keluarga. Dengan adanya ajaran ini perempuan tidak dapat merasakan kebebasan karena seumur hidupnya dia abdikan untuk kepentingan dan kebahagiaan keluarga.

2.2.1.2 Setelah Perang Dunia II

Pada masa setelah perang, sistem *ie* dihapuskan sehingga mulai muncul hak pribadi dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Pernikahan pun tidak lagi menjadi wewenang *kachou*, melainkan menjadi urusan pribadi dan perempuan memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya.

Pandangan tentang ‘pernikahan adalah kebahagiaan perempuan’ perlahan mulai memudar. Dari survey nasional yang dilakukan pada tahun 1972 dan 1992 tentang “perempuan dan pernikahan”, jumlah responden yang menjawab bahwa “pernikahan adalah kebahagiaan perempuan” mengalami penurunan dari 80% menjadi 40% (Makoto, 2001:15). Perempuan pun mulai membandingkan antara keuntungan dan kekurangan pernikahan. Hasilnya, perempuan tidak lagi menikah secara terburu-buru.

Dengan berkurangnya makna “pernikahan adalah kebahagiaan perempuan”, maka perempuan tidak lagi mendapat tekanan dari orang tua atau pun masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan memudarnya makna “pernikahan adalah kebahagiaan perempuan” secara tidak langsung telah menghilangkan *kekkon tekireiki* bagi perempuan. Perempuan tidak lagi harus menikah di usia 20-24 tahun. Mereka bebas melakukan pernikahan pada usia berapa pun tanpa takut disebut *urenokori* atau *christmas cake* lagi.

Pembagian peran yang tidak adil antara suami dan istri (istri harus tetap mengurus rumah tangga meskipun bekerja dan suami yang tidak membantu pekerjaan rumah tangga) juga membuat perempuan ragu untuk menikah. Pada tahun 1989, hanya 14% perempuan yang menikah di awal usia 20-an, sisanya tetap melajang hingga usia 25 tahun. Menurunnya jumlah pernikahan ini juga

disebabkan oleh adanya pandangan bahwa pernikahan tidak selamanya memiliki manfaat. Berdasarkan survey yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan pada tahun 2004, perempuan menganggap bahwa pernikahan juga memiliki kekurangan, antara lain: mengurangi kebebasan (65%), hubungan yang rumit dengan mertua dan saudara (58%), dan harus mengurus pekerjaan rumah tangga (39%).

Pada masa setelah perang, pernikahan tidak lagi dilakukan karena perjdodohan, tetapi atas dasar cinta atau yang biasa disebut *ren'ai kekkon* (恋愛結婚). Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut.

“戦後、新民法では結婚成立には当事者間の合意が必要とされ、恋愛が社会的に許容され、当事者が結婚のメリットとデメリットを考慮する<個人主義的結婚>となる”⁸

Senzou, shinminpou de ha kekkon seiritsu ni ha toujishakan no gou'i ga hitsuyou to sare, ren'ai ga shakaiteki ni kyoyou sare, toujisha ga kekkon no merito to demeritto wo kouryosuru (koujin shugiteki kekkon) to naru.

Terjemahan:

“Dalam Undang-Undang Perdata Baru pasca Perang, dalam pernikahan persetujuan antar dua pihak adalah hal yang penting. *Ren'ai kekkon* dilakukan karena persetujuan dan kedua belah pihak mempertimbangkan keuntungan dan kekurangan dari pernikahan sehingga menjadi ‘pernikahan berdasarkan prinsip pribadi’”

Undang-undang yang dimaksud adalah *Nihon Koku Kenpou* yang diterapkan pada tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pernikahan harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam pasal 24 ayat 1, yaitu:

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

⁸ Inoue. *Op. Cit.* Hal.12

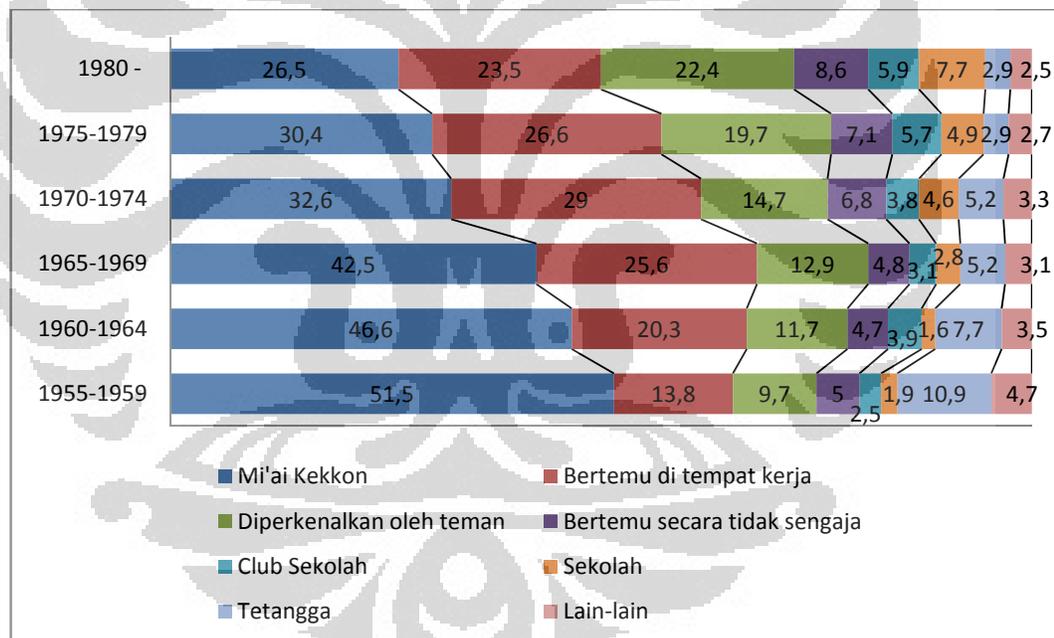
Kon'in ha, ryousei no gou'i nomini motodzuite seiritsushi, fuufu ga doutou kenri wo yuusuru koto wo kihon toshite, sougo no kyouryoku ni yori, ijisarenakerebanaranai.

Terjemahan:

“Pernikahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, suami-istri memiliki hak yang sama, saling bekerja sama, dan saling menjaga.”

Dengan adanya undang-undang tersebut, dewasa ini pernikahan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama dan keinginan pasangan yang akan menikah diprioritaskan dibandingkan keinginan orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dari *mi'ai kekkon* ke *ren'ai kekkon*.

Grafik 2.2 – Perubahan pada *Mi'ai Kekkō* dan *Ren'ai Kekkō*



Sumber: *Women's Data Book* (1990), hal.11

Perubahan *mi'ai kekkō* ke *ren'ai kekkō* dapat dilihat pada Grafik 2.2. Setiap tahunnya jumlah *mi'ai kekkō* semakin berkurang (51.5% pada tahun 1955 menjadi 26.5% pada tahun 1980) sedangkan *ren'ai kekkō* terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sekarang tidak lagi hanya berdiam diri di rumah sehingga mereka dapat bertemu dengan pasangan mereka di

berbagai tempat (sekolah, klub sekolah, tempat kerja) dan hal ini pun menyebabkan pernikahan antar tetangga semakin menurun karena ruang lingkup sosial perempuan semakin luas.

Dengan adanya aturan tentang pernikahan dalam *Nihon Koku Kenpou* dan dihapusnya sistem *ie*, maka pernikahan tidak lagi dilaksanakan atas persetujuan dan pilihan *kachou*. Perempuan pun dapat memilih pasangan hidupnya secara bebas. Hal yang dilihat dari pasangan pun tidak lagi hanya berdasarkan pekerjaan dan latar belakang pendidikan, tetapi juga sifat dan kesediannya untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak.

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa tiga kriteria utama yang dilihat perempuan dalam memilih pasangan adalah karakter/sifat (98.1%), laki-laki yang mau mengurus masalah rumah tangga dan anak-anak (95%), dan laki-laki yang mengijinkannya untuk bekerja (92.4%). Hal ini berbeda dengan tahun 1997 di mana kriteria kedua adalah kemapanan sang pasangan dan kriteria ketiga adalah laki-laki yang mau mengurus masalah rumah tangga dan anak-anak.

Tabel 2.1 – Kriteria Pemilihan Pasangan (%)⁹

Kriteria	Laki-Laki		Perempuan	
	1997	2002	1997	2002
Pendidikan	23.5	21.0	49.7	43.9
Pekerjaan	35.8	37.1	77.9	79.2
Kemapanan	30.8	29.4	90.9	91.1
Karakter/Sifat	95.1	92.8	97.8	98.1
Fisik	74.0	76.8	67.2	73.2
Hobi	70.4	75.2	78.9	81.4
Mengijinkan Bekerja	88.3	88.1	88.4	92.4
Mau membantu Pekerjaan Rumah tangga dan mengurus anak	86.8	89.9	89.7	95.0

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan ingin pembagian peran yang adil. Mereka menginginkan laki-laki yang mengerti keadaan mereka dan juga mau

⁹ <http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a04/mikonka-bankonka-houkokusyo.html>

mengurus rumah tangga. Selain itu, mereka juga memilih pasangan yang mengijinkannya untuk bekerja di luar rumah. Hal ini jelas dikarenakan mulai munculnya kesadaran pada diri perempuan bahwa mereka tidak ingin seperti ibu mereka yang menghabiskan dan merelakan waktunya hanya untuk keluarga tanpa sempat memikirkan keinginannya sendiri.

2.2.2 Terbukanya Kesempatan bagi Perempuan untuk Mendapat Pendidikan

Pada masa sebelum perang, pendidikan bagi perempuan bukanlah menjadi modal baginya untuk mendapat pekerjaan, tetapi merupakan sebagai alat untuk menyiapkan perempuan sebagai *ryousai kenbo* sehingga pelajaran yang didapat pun berkaitan dengan hal-hal rumah tangga, seperti menyulam, menjahit, dan lain-lain. Selain itu, hampir tidak ada perempuan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Terbatasnya pendidikan bagi perempuan pada masa itu dikarenakan konsep Konfusianisme yang dianut masyarakat, yaitu tugas perempuan adalah melahirkan dan membesarkan anak sehingga pendidikan bukanlah hal yang penting bagi perempuan.

Pada masa Meiji, setelah kaisar mengumumkan “Sumpah Lima Pasal” (*Gokajo no Goseimon*)¹⁰ tahun 1868, maka pemimpin-pemimpin Meiji segera merencanakan satu politik pendidikan yang sesuai dengan tujuan pemerintahan baru.¹¹ Pada tahun 1871 dibentuk Kementerian Pendidikan dan tahun berikutnya diumumkan Undang-Undang Dasar Pendidikan yang berisi tentang wajib belajar

¹⁰ Sumpah Lima Pasal (*Gokajo no Goseimon*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji pada tanggal 6 April 1868. Sumpah ini membuka jalan bagi modernisasi Jepang. Isi dari *Gokajo no Goseimon* adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan majelis dibentuk dalam skala luas dan semua masalah pemerintahan harus ditentukan melalui diskusi publik
2. Seluruh lapisan masyarakat, baik tinggi maupun rendah, harus bersatu dalam menjalankan rencana pemerintah
3. Seluruh lapisan masyarakat diperbolehkan untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga tidak ada ketidakpuasan
4. Kebiasaan buruk pada masa lampau harus dihilangkan dan segala kebiasaan baru harus berdasarkan hukum
5. Pendidikan adalah penting bagi pembangunan nasional. Untuk itu, ilmu dan teknologi harus dituntut ke berbagai penjuru muka bumi demi kemajuan Jepang

¹¹ Anwar, Ansar. *Peranan Fukuzawa Yukichi dalam Memodernisasi Pendidikan Jepang pada Zaman Meiji*. (Bogor: 1999). Hal. 67

selama empat tahun bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial.¹² Pada bulan September 1872, pemerintah Meiji memberlakukan sistem pendidikan baru yang disebut *Gakusei* (学制). Sistem *Gakusei* berbeda dengan sistem yang berlaku pada masa Tokugawa, yaitu *Terakoya*. Dalam *Terakoya*, anak-anak datang ke rumah *sensei* (guru) sedangkan dalam sistem *Gakusei*, siswa diharuskan pergi ke sekolah dan untuk pertama kalinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

...少なくとも初等教育では男女の差別を受けなかったである
...「教育を受けること」とは「学校へいくこと」になった。¹³

... *shukunakutomo shotou kyouiku de ha danjo no sabetsu wo ukenakatta de aru. ... "kyouiku wo ukeru koto" to ha "gakkou he iku koto" ni natta.*

Terjemahan:

... Setidaknya dalam pendidikan dasar tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ... Yang dimaksud dengan “mendapat pendidikan” adalah dengan “pergi ke sekolah”.

Dalam sistem *Gakusei*, seluruh negeri dibagi dalam 8 wilayah universitas dan pada tiap-tiap wilayah sekolah universitas diadakan 32 sekolah menengah. Pada tiap-tiap wilayah sekolah menengah terdapat 210 sekolah dasar. Berdasarkan rencana ini, maka akan terdapat 53.760 sekolah dasar, satu sekolah dasar untuk tiap 600 orang.¹⁴ Menurut statistik tahun 1873, setahun sesudah dikeluarkan *Gakusei*, telah ada lebih dari 13.000 sekolah dasar yang berjalan, 45% dari seluruh anak laki-laki dan 17% dari anak perempuan telah mengikuti pelajaran di sekolah.¹⁵

Dalam Undang-Undang Dasar Pendidikan 1872, dilarang adanya perbedaan kelas dalam pendidikan dan perempuan mendapat kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya, tidak ada diskriminasi dalam pengajaran pada anak laki-

¹² Kimi Hara. *Challenges to Education for Girls and Women in Modern Japan: Past and Present*. (New York:1995). Hal. 96

¹³ Inoki Takenori. *Josei to Kazoku*. (Japan:1995). Hal. 82

¹⁴ *Ibid*. Hal.79

¹⁵ Anwar. *Op. Cit*. hal.73

laki maupun perempuan. Keduanya memperoleh pelajaran yang sama. Namun, pada tahun 1879, kebijakan pendidikan yang baru (*kyou'iku rei* – 教育令) telah menempatkan anak laki-laki dan perempuan dalam kelas-kelas yang terpisah setelah lepas dari pendidikan dasar yang dikenal dengan *danjo betsugaku*.¹⁶ Setelah lepas dari pendidikan dasar, laki-laki meneruskan ke jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi dan bahkan dipersiapkan untuk melanjutkan hingga ke universitas sedangkan perempuan melanjutkan ke sekolah menengah khusus/kejuruan (*senmon gakkou* – 専門学校) yang kurikulumnya didesain untuk menyiapkan perempuan menjadi *ryousai kenbo*, yaitu berupa keterampilan kerumahtanggaan.

Pada tahun 1887, Mori Arinori, Menteri Pendidikan Jepang yang pertama, mengeluarkan pernyataan tentang pendidikan perempuan, yaitu:

If I summarise the point regarding the chief aim of female education, it is that the person will become a good wife (ryousai) and wise mother (kenbo); it is to nurture a disposition and train talent adequate for [the task] of rearing children and the foundation (konpon) of education is female education, we must remember, has bearing on national tranquility or its absence. (Vera Mackie, 2003:25)¹⁷

Dari pernyataan Mori Arinori tersebut terlihat jelas bahwa tujuan utama pendidikan bagi perempuan adalah menjadikannya istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Dengan demikian, perempuan tidak dapat memilih jurusan sesuai dengan keinginannya karena kurikulum pendidikan bagi perempuan telah ditetapkan untuk menyiapkannya menjadi *ryousai kenbo*.

Pandangan tentang *ryousai kenbo* tersebut terus melekat dalam masyarakat Jepang hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Pendidikan pada masa itu diberikan dengan tujuan untuk melatih perempuan agar memiliki pemikiran

¹⁶ Endah H. Wulandari. *Domestikasi Perempuan Melalui Doktrin Ryouisaikenbo: Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah Meiji*. Hal. 5

¹⁷ Vera Mackie. *Feminism in Modern Japan*. (New York: 2003) dalam Endah H. Wulandari *Domestikasi Perempuan Melalui Doktrin Ryouisaikenbo*, hal.6.

bahwa mereka memandang negara sebagai keluarga dan melakukan yang terbaik untuk anggota keluarganya.¹⁸

Setelah Perang Dunia II – dengan adanya undang-undang baru, yaitu *Nihon Koku Kenpou* (日本国憲法) tahun 1946 – perempuan memiliki persamaan hak dalam mendapat pendidikan. Hak untuk mendapat pendidikan tersebut tertuang dalam Bab III (Hak dan Kewajiban Warga Negara) pasal 26:

1. すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

Subete kokumin ha, houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono nouryoku ni oujite, hitoshiku kyou'iku wo ukeru kenri wo yuusuru.

2. すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

Subete kokumin ha, houritsu no sadameru tokoro ni yori, sono hogo suru shijo ni futsuu kyou'iku wo ukesaseru gimu wo ofu. Gimu kyou'iku ha, kore wo mushou to suru.

Terjemahan:

1. Setiap warga negara dijamin oleh hukum untuk memperoleh pendidikan berdasarkan kemampuannya.
2. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Pendidikan dasar ini diberikan secara gratis.

Selain dalam *Nihon Koku Kenpou*, hukum tentang pendidikan juga terdapat dalam 教育基本法 (*kyou'iku kihon hou* – Undang-Undang Dasar Pendidikan) yang dibentuk pada tahun 1947. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal tentang persamaan kesempatan untuk mendapat pendidikan, yaitu pasal 3 ayat 1:

¹⁸ Junko Kiguchi. *Japanese Women's Rights at the Meiji Era*. Hal.137
(http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17_syakai2.pdf)

“すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならない、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない”¹⁹

Subete kokumin ha, hitoshiku, sono nouryoku ni oujita kyouiku wo ukeru kikai wo ataerarenakereba narazu, jinshu, shinjou, seibetsu, shakai teki mibun, kezaiteki chi'i mata ha monchi ni yotte, kyouiku jou sabetsu sarenai.

Terjemahan:

“Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, serta status sosial dan ekonomi.”

Jika pada masa sebelum perang perempuan tidak melanjutkan pendidikan ke universitas melainkan ke *senmon gakkou*, maka pada masa setelah perang – karena adanya persamaan hak dalam pendidikan – jumlah perempuan yang meneruskan pendidikan hingga pendidikan tinggi pun terus meningkat (tabel 2.2).

Motivasi mereka untuk melanjutkan ke universitas pun beragam: “untuk menuntut ilmu”, “untuk memperkaya budaya”, “untuk memperoleh keterampilan dan persiapan untuk karir di masa depan”, “untuk mendapatkan teman dan bersenang-senang”, “karena semua orang di sekitar saya melanjutkan ke universitas”, “untuk menghabiskan waktu sebelum menikah”, “karena saya ingin menikah dengan laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan universitas”.²⁰ Dengan meningkatnya jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, jumlah perempuan yang belum menikah pada kelompok usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun pun mengalami peningkatan. Pada tahun 1970, jumlah perempuan pada kelompok usia 15-19 tahun yang belum menikah adalah 97.9% dan pada tahun 2000 meningkat menjadi 99.1%. Lalu, pada kelompok usia 20-24 tahun, dari 71.9% pada tahun 1970 menjadi 87.9% pada tahun 2000 (Noll, 2004).

¹⁹ <http://www.kyouiku-net.org/data/47kyoukihou.pdf>

²⁰ Kumiko Fujiwara-Fanselow. *College Women Today: Option and Dilemmas*. (New York: 1995). Hal.134

Tabel 2.2 – Jumlah Perempuan yang Melanjutkan Pendidikan (%)

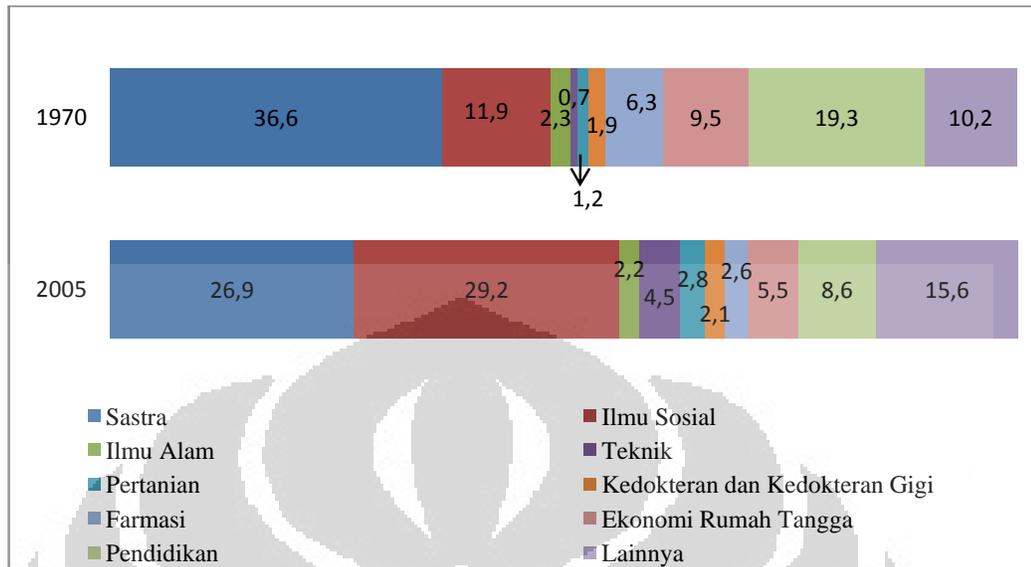
Tahun	SMA	Akademi	Universitas
1960	55.9	3.0	2.5
1970	82.7	11.2	6.5
1980	95.4	21.0	12.3
1990	95.6	22.2	15.2
1995	97.0	24.6	22.9
2000	96.8	17.2	31.5
2005	96.8	13.0	36.8
2009	96.5	11.1	44.2

Catatan: 1. Data diambil dari MEXT, School Basic Survey (2010)

2. Persentase yang melanjutkan ke akademi dan universitas adalah yang berusia 18 tahun.

Selain jumlah yang melanjutkan ke perguruan tinggi terus bertambah, pemilihan bidang studi pun tidak lagi hanya terbatas pada keterampilan yang diperlukan dalam rumah tangga. Dari grafik 2.3 terlihat bahwa persentase terbesar pemilihan jurusan di universitas bagi perempuan adalah sastra dan ilmu sosial. Jumlah perempuan yang memilih jurusan teknik mengalami kenaikan dari 0.7% pada tahun 1970 menjadi 4.5% pada tahun 2005. Sebaliknya, yang memilih jurusan ekonomi rumah tangga mengalami penurunan dari 9.5% menjadi 5.5%. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya memilih jurusan yang mempersiapkannya untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi memilih jurusan yang sesuai dengan minatnya dan hal ini merupakan suatu perkembangan dibandingkan sistem pendidikan pada masa Meiji yang hanya memperbolehkan perempuan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan *ryousai kenbo*.

Grafik 2.3 – Pemilihan Jurusan di Universitas



Sumber: MEXT, School Basic Survey

Dengan dihapusnya sistem *ie* setelah Perang Dunia II, maka pandangan *ryousai kenbo* pun mulai memudar. Perempuan tidak lagi melanjutkan pendidikan untuk sekadar menjadi ibu rumah tangga yang baik, tetapi sebagai wujud aktualisasi diri mereka dan untuk mendapat pekerjaan. Jumlah perempuan lulusan universitas yang bekerja pun meningkat dari 36.1% pada tahun 2000 menjadi 57.8% pada tahun 2010. Sebaliknya, jumlah perempuan lulusan *tanki daigaku* mengalami penurunan, yaitu dari 34% menjadi 25.6% pada tahun yang sama (MHLW, 2010).

2.2.2 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja

Meningkatnya tenaga kerja perempuan di Jepang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi yang terjadi di Jepang. Pada awal pemerintahan Meiji perekonomian Jepang masih bertumpu pada sektor pertanian sehingga sebagian besar perempuan bekerja di sektor pertanian dan bekerja sebagai *kazoku roudousha* (家族労働者 – pekerja untuk keluarga). Karena mereka bekerja sebagai *kazoku roudousha*, maka mereka hanya mendapat sedikit upah kerja atau bahkan tidak mendapat upah kerja sama sekali.

Tabel 2.3 – Distribusi Pekerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan dan Jenis Kelamin 1872-1990 (%)²¹

Tahun	Perempuan			Laki-laki		
	Primer	Sekunder	Tersier	Primer	Sekunder	Tersier
1872	77.2	22.8		69.3	30.7	
1890	74.3	25.7		63.3	36.7	
1900	71.6	28.4		60.4	39.6	
1910	70.9	12.7	9.1	60.0	18.3	19.7
1920	62.4	16.3	19.5	48.2	23.3	38.2
1930	60.8	14.1	25.0	43.1	23.9	32.7
1940	57.0	15.7	26.9	35.7	32.9	30.7
1950	61.2	13.2	25.5	40.2	27.4	32.3
1960	43.1	20.2	36.6	25.8	35.0	39.2
1970	26.5	26.2	47.6	14.9	39.3	45.8
1980	13.2	28.2	58.4	8.7	38.9	52.2
1990	8.5	27.3	63.8	6.4	38.1	56.5

Sumber: Yoko Kawashima (1995), hal. 273

Dari tabel 2.3 dapat diketahui bahwa pada awal pemerintahan Meiji jumlah pekerja perempuan masih terkonsentrasi di sektor primer, yaitu 77.2% pada tahun 1872. Namun, jumlah ini perlahan-lahan menurun seiring dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di Jepang. Pada pertengahan tahun 1870, pemerintah Meiji mulai membangun beberapa industri ringan seperti industri pemintalan dan industri tekstil. Industri pemintalan dan tekstil merupakan industri inti pada masa awal industrialisasi hingga industri berat mulai berkembang setelah tahun 1910. Dengan adanya pembangunan industri tersebut, mulai muncul pekerjaan sekunder dan tersier. Hasilnya, perempuan mulai bekerja di bidang selain sektor primer dan jumlah tenaga kerja perempuan di sektor

²¹ Keterangan: yang termasuk sektor primer adalah pertanian, perhutanan, dan perikanan. Namun, karena sebagian besar tenaga kerja perempuan terserap di sektor pertanian, maka sektor primer sering diartikan sebagai pertanian. Sektor sekunder adalah industri, seperti pertambangan, konstruksi, *manufacturing*, pemintalan, dan lain-lain. Sektor tersier adalah *service*, pendidikan, dan pemerintahan.

primer pun terus mengalami penurunan bahkan berada di bawah 50% pada tahun 1960.

Pada masa Perang Dunia I (1914-1918), dengan berkurangnya kemampuan ekonomi Eropa dalam pasar Asia dan majunya Amerika, Jepang – yang pada saat itu menjadi sekutu Amerika – mulai mengalami kemajuan ekonomi. Selama periode 1914-1918, tercatat surplus sebesar 1475 juta yen dan pada tahun 1915-1920 surplus sebesar 2207 juta yen.²² Kemajuan ini tidak terlepas dari peningkatan produksi katun dan sutera sehingga Jepang mampu mengeksport barang-barang tersebut dan bahkan menggusur peringkat Manchester dari posisinya sebagai pusat industri tekstil dunia.²³ Dengan berkembangnya industri tekstil dan tenun, jumlah perempuan yang bekerja di industri tersebut pun mengalami peningkatan, yaitu 17.084 pada tahun 1879; 206.650 pada tahun 1915; dan mencapai puncaknya pada tahun 1929 yaitu 375.330 (Nakamura Masanori, 1994:39).

Sebagian besar pekerja perempuan yang bekerja di sektor sekunder adalah mereka yang berusia di bawah 20 tahun (tabel 2.4); berasal dari keluarga petani miskin; bekerja hanya dalam waktu yang singkat (1-3 tahun); dan akan kembali ke daerah masing-masing untuk menikah.²⁴ Motivasi mereka bekerja bukanlah untuk kepentingan diri mereka sendiri, melainkan untuk membantu keuangan keluarga.

Karena sebagian besar dari mereka bekerja di bawah 20 tahun, pendidikan yang mereka miliki pun hanya sebatas pendidikan dasar. Pada tahun 1924, 68.6% dari total pekerja perempuan di industri tekstil adalah mereka yang lulusan sekolah dasar sedangkan sisanya tidak lulus sekolah dasar (17.6%) dan bahkan tidak sekolah sama sekali (6.5%).²⁵

²² Yoshihara Kunio. *Pembangunan Ekonomi Jepang*. (Jakarta: 1992). Hal. 11

²³ *Ibid.* Hal. 9

²⁴ Janet Hunter. "Japanese Women at Work, 1880-1920". *History Today* (1993).

²⁵ Nakamura Masanori. *Technology Change and Female Labour in Japan*. (Tokyo: 1994). Hal. 7

Tabel 2.4 – Persentase Pekerja Perempuan Berdasarkan Usia (1901)

	Di bawah 14	15-19	Di atas 20
Pemintalan Katun	11.4	41.6	47.0
Penggulungan Sutera	18.3	47.9	33.8
Tekstil	16.7	39.9	43.4
Korek Api	18.6	40.3	41.1
Rokok	6.7	43.5	49.7

Sumber: Nakamura (1994: 6)

Pada masa itu, perempuan memegang peranan penting dalam awal industrialisasi di Jepang karena semua barang yang mereka produksi (kecuali rokok) merupakan barang ekspor. Meskipun demikian, kondisi kerja mereka cukup memprihatinkan. Upah kerja mereka dibayar terlebih dahulu, tetapi uang tersebut dibayarkan kepada orang tua sehingga mereka mau tidak mau harus bekerja dengan patuh untuk beberapa tahun. Berdasarkan “perjanjian” yang dilakukan, pekerja tidak boleh berhenti bekerja sebelum waktu yang telah ditentukan dan memperbolehkan perusahaan untuk melakukan pelanggaran, seperti memecat pekerja secara sepihak.²⁶ Selain itu, jam kerja mereka pun cukup tinggi, sebagai contoh jam kerja di industri sutera adalah 12-15 jam per hari. Dan pada tahun 1901 ditemukan sebuah berita bahwa pekerja usia 12-13 tahun hanya memiliki waktu untuk tidur selama empat jam dalam sehari, bahkan mereka tidak memiliki waktu untuk makan.²⁷

Karena kondisi kerja yang cukup memprihatinkan tersebut, maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan untuk melindungi tenaga kerja perempuan. Dalam *Factory Act* (工場法 – *koujohou*) 1916 pasal 2 terdapat larangan untuk mempekerjakan anak laki-laki maupun perempuan yang berusia di bawah 12 tahun. Dalam pasal 3 dituliskan bahwa jam kerja untuk tenaga kerja

²⁶ *Ibid.* hal.73

²⁷ *Ibid.* hal. 7

muda, baik laki-laki maupun perempuan, adalah 12 jam (untuk perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 15 orang).²⁸

Setelah diterapkannya *Factory Act*, sistem “pembayaran di muka” dihapuskan dan diganti dengan sistem kontrak berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun, hukum ini tidak terlalu berjalan efektif karena masih banyak perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, sebagai contoh pada tahun 1923 perusahaan sutera di daerah Suwa tetap mempekerjakan anak-anak di bawah usia 13 tahun (150 orang).²⁹

Setelah mengalami kemajuan ekonomi pada masa Perang Dunia I, Jepang mengalami resesi ekonomi pada tahun 1920-1929. Salah satu penyebabnya adalah gempa bumi di Kanto pada tahun 1923 dan kembalinya kemampuan ekonomi Eropa dalam pasar Asia setelah Perang Dunia I berakhir. Hal ini menyebabkan tekanan ekonomi baru bagi para perempuan kelas menengah untuk memasuki dunia kerja.³⁰

Dengan adanya Perang Jepang-Cina pada bulan Juli 1937, pemerintah memperketat kontrol ekonomi di seluruh negeri. Tujuan dari kontrol ekonomi ini adalah untuk mengubah struktur industri agar lebih terpusat pada pembuatan amunisi dan agar dapat menguasai produksi industri berat serta melanjutkan perang. Pada tahun 1940 jumlah produksi logam dan mesin mencapai 49% dengan jumlah pekerja 45% dari seluruh jumlah pekerja pada tahun itu. Sebaliknya, jumlah produksi dan tenaga kerja di industri pemintalan dan tekstil menurun, yaitu 17% untuk jumlah produksi dan 26% untuk jumlah tenaga kerja.³¹ Perubahan struktur ekonomi ini pun menyebabkan perubahan pada jumlah tenaga kerja perempuan. Dengan berkembangnya industri berat, jumlah tenaga kerja perempuan secara keseluruhan menurun dari 45.7% di tahun 1935 menjadi 33.8% di tahun 1940. Namun, jumlah tenaga kerja perempuan pada industri berat

²⁸ *Ibid*, hal. 47

²⁹ *Ibid*, hal. 40

³⁰ Mark Metzler. “Woman’s Place in Japan’s Great Depression: Reflection on the Moral Economy of Deflation”. *Journal of Japanese Studies* (2004), hal. 324.

³¹ Nakamura (1994). *Op. Cit.* hal. 4

mengalami peningkatan, yaitu 8.2% pada tahun 1935 meningkat menjadi 10.2% pada tahun 1940.³²

Meskipun sempat mengalami penurunan, jumlah tenaga kerja perempuan kembali mengalami peningkatan terutama saat terjadi Perang Dunia II di mana terjadi kekurangan tenaga kerja laki-laki karena sebagian besar laki-laki pergi berperang. Pada tahun 1943, kabinet menyetujui “*Outline of Emergency Measures of Labour and Production Increase*” yang menentukan kuota untuk tenaga kerja perempuan menggantikan tenaga kerja laki-laki.³³ Hasilnya, hingga akhir Perang Dunia II, banyak perempuan yang bekerja di industri berat.

Seiring dengan peningkatan tenaga kerja perempuan, usia rata-rata pada pernikahan pertama pun mengalami peningkatan. Pada tahun 1914, MAFM perempuan adalah 23 tahun sedangkan pada tahun 1943 adalah 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan berkurangnya keinginan perempuan untuk menikah.

2.3 Gambaran *Bankonka* di Jepang

Di abad 20, Jepang mengalami *bankonka* sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1930 hingga pertengahan tahun 1940 dan pada pertengahan tahun 1970. Pada awal zaman Taisho (1912), MAFM laki-laki adalah 27 tahun sedangkan perempuan 23 tahun. Pada tahun 1932-1933 mulai mengalami kenaikan (tahun 1933 MAFM laki-laki adalah 27.6 tahun dan perempuan 23.6 tahun) dan sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1942 MAFM laki-laki menjadi 29.8 tahun dan perempuan 25.3 tahun. Pada masa setelah perang (1947), MAFM kembali mengalami penurunan yaitu 26.1 tahun untuk laki-laki dan 22.9 tahun untuk perempuan. MAFM kembali mengalami kenaikan pada tahun 1973, yaitu 26.7 tahun untuk laki-laki dan 24.3 tahun untuk perempuan.³⁴ Dengan meningkatnya *bankonka*, maka jumlah pernikahan mengalami penurunan. Pada tahun 1972,

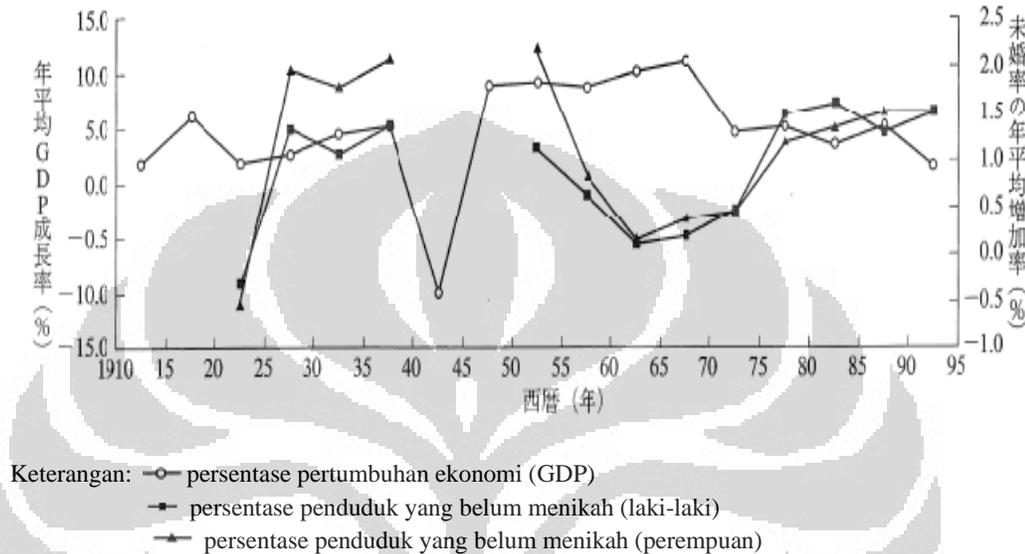
³² *Ibid*, hal. 5

³³ *Ibid*, hal.18

³⁴ Katou Akihiko. “Mikonka wo Oshi Susumete kita Futatsu no Chikara: keizai seichou no teika to kojini shuugi no ideorogi”. *Journal of Population Problems* (2011). Hal. 3-4.

persentase pernikahan di Jepang adalah 10.4%. Jumlah ini menurun pada awal tahun 1980-an menjadi 6.6% dan pada tahun 2004 menjadi 5.7%.

Grafik 2.4 – Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk yang Belum Menikah dan Persentase Pertumbuhan Ekonomi³⁵



Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa gejala *bankonka* kedua mulai nampak pada pertengahan tahun 1970, yaitu bersamaan dengan berakhirnya periode perekonomian tinggi di Jepang. Pada tahun 1960-1970, bersamaan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jepang yang mencapai 10%, jumlah orang yang belum menikah berada di titik terendahnya (baik laki-laki maupun perempuan). Artinya, dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut jumlah orang yang belum menikah hampir mendekati 0%. Namun, jumlah tersebut mulai meningkat setelah tahun 1970 (bersamaan dengan menurunnya ekonomi Jepang dari 10% menjadi 5%) dari 0% menjadi 0.5% dan jumlah tersebut semakin meningkat hingga tahun 1995 yang mencapai 1.5% (Grafik 2.4).

Meningkatnya jumlah orang yang belum menikah, menurut Raymo (1998), bukanlah karena semakin sedikitnya orang yang menolak untuk menikah, tetapi karena semakin banyaknya orang yang menunda pernikahannya.

³⁵ Kato, Akihiko. "The Postponement of Marriage, Socioeconomic Stratification, and The Decline in Economic Growth". *Japanese Journal of Family Sociology* (2001), hal. 51.

“The increases in the proportion never married are the result of a delay in marriage, rather than a rejection of marriage.”

Terjemahan:

“Meningkatnya jumlah orang yang belum menikah merupakan akibat dari penundaan pernikahan daripada penolakan terhadap pernikahan.”

Jumlah perempuan yang belum menikah terutama terlihat pada kelompok usia akhir 20-an dan awal 30-an. Antara tahun 1970-1995, jumlah perempuan yang belum menikah meningkat 21% pada kelompok usia 20-24 tahun, 166% pada kelompok usia 25-29 tahun, dan 173% pada kelompok usia 30-34 tahun.³⁶ Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, perempuan sedang berkonsentrasi pada pekerjaan sehingga mereka kurang memikirkan masalah pernikahan. Alasan mereka belum menikah adalah karena dengan menjadi *dokushin* (独身- *single*), mereka memiliki beberapa keuntungan, antara lain bebas beraktifitas dan menjalani kehidupan (68%) dan memiliki hubungan pertemanan yang luas (30%).³⁷

Berdasarkan data dari *kousei roudoushou* (Ministry of Health, Labour and Welfare), usia rata-rata pada pernikahan pertama pada tahun 1975 adalah 27 tahun untuk laki-laki dan 24.7 tahun untuk perempuan. Pada tahun 2005, 29.8 tahun untuk laki-laki dan 28 tahun untuk perempuan. Selama 30 tahun telah terjadi peningkatan usia 2.8 tahun pada laki-laki dan 3.3 tahun pada perempuan. Peningkatan ini khususnya terjadi pada perempuan, 25.8 tahun pada tahun 1989; 26.8 tahun pada tahun 1999. Dalam kurun waktu 10 tahun tersebut terjadi peningkatan satu tahun. Pada tahun 2004 usia rata-rata pernikahan pertama perempuan adalah 27.8 tahun. Jika pada tahun sebelumnya membutuhkan waktu 10 tahun (1989-1999), maka peningkatan 1 tahun berikutnya terjadi hanya dalam kurun waktu lima tahun (1999-2004). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penundaan usia pernikahan terjadi dengan sangat cepat.

³⁶ James M. Raymo. Later Marriages or Fewer? Changes in the Marital Behavior of Japanese Women. (*Journal of Marriage and Family*: 1998), hal.1023.

³⁷ Inoue (2005), *Op. Cit.* hal. 10.

Dengan meningkatnya *bankonka*, baik laki-laki maupun perempuan mencoba mengalihkan perhatian mereka kepada hal lain selain pernikahan. Dari survey yang dilakukan pada laki-laki dan perempuan yang belum menikah pada usia 18-34 tahun, laki-laki menghabiskan waktu luangnya untuk bekerja dan melakukan hobi (58.4%) sedangkan perempuan lebih tertarik untuk melakukan perjalanan (*traveling*) dan menghabiskan waktu bersama teman (66%).³⁸ Dengan menghabiskan waktu untuk melakukan hobi atau pun bersama teman, mereka tidak akan terlalu memikirkan pernikahan karena memiliki kegiatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa *life-style* (pola hidup) perempuan masa kini berbeda dengan pola hidup orang tua (ibu) mereka yang hanya menghabiskan waktunya untuk keluarga.

Akiko (1999) berpendapat bahwa ada kaitan antara *life-style*³⁹ dan *bankonka*. Pertama, karena perannya sebagai ‘pencari nafkah’, laki-laki akan memikirkan pernikahan dengan lebih serius. Dengan kata lain, dia tidak dapat dengan secara sembarangan memutuskan untuk menikah ketika belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang layak. Sedangkan perempuan akan mencari pasangan yang mau meluangkan waktunya untuk membantu pekerjaan rumah dan mengijinkannya untuk bekerja di luar rumah. Hasilnya, perempuan akan lebih memilih untuk menunda pernikahan daripada menikah dengan pasangan yang tidak sesuai dengan kriterianya.

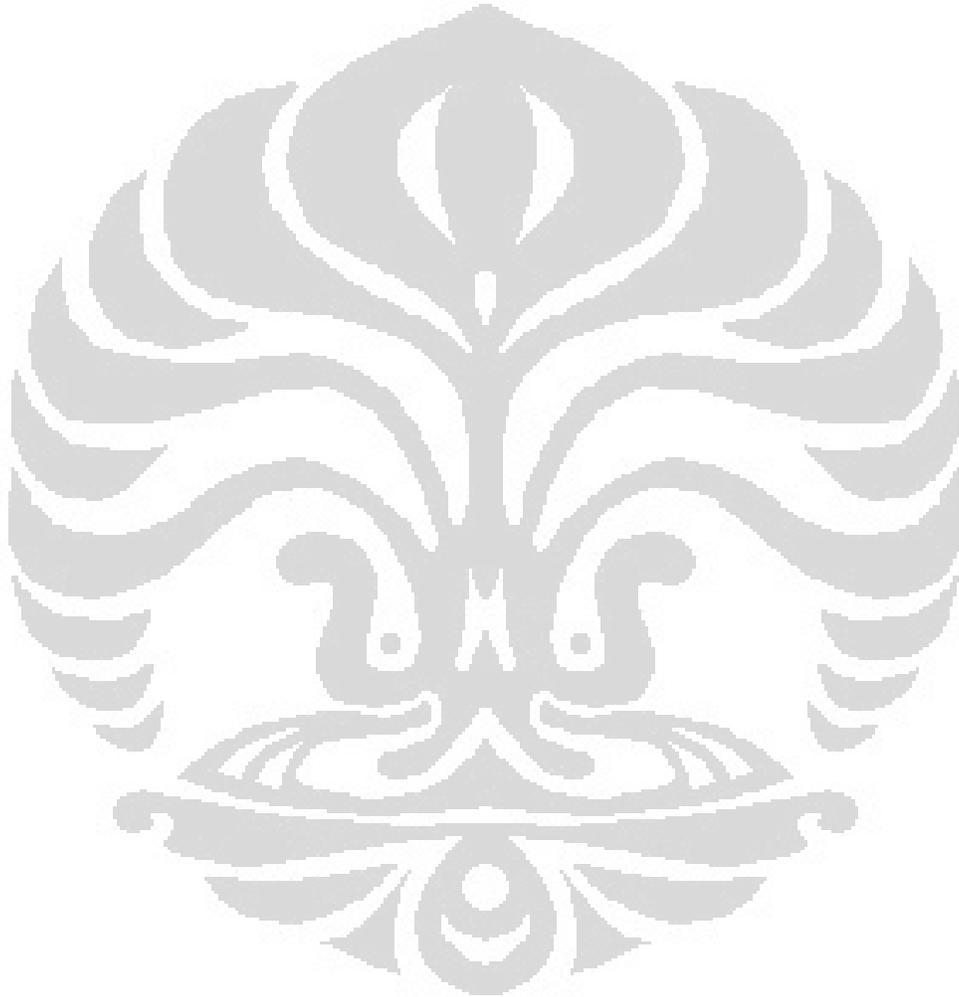
Kedua, *life-style* memberikan efek yang berbeda pada perempuan dan laki-laki. Bagi laki-laki, pernikahan akan membuat kehidupannya lebih bermakna sehingga dia memiliki tujuan untuk menikah. Sebaliknya, bagi perempuan pernikahan berarti melepas segala kebebasan yang selama ini dia rasakan sehingga dia memilih untuk menghindari dari pernikahan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *bankonka* di Jepang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari semakin

³⁸ Shigesato Takahashi. “Attitudes toward Marriage and the Family among the Unmarried Japanese Youth”. *Journal of Population and Social Security* (1997) Vol.1 No.1.

³⁹ *Life style* yang dimaksud oleh Akiko mengarah pada ‘nilai’ individu. ‘Nilai’ tersebut merupakan perwujudan dari suatu proses yang menentukan posisi masing-masing individu dalam masyarakat secara sosioekonomi.

tingginya usia rata-rata pada pernikahan pertama dan perubahan pola hidup perempuan yang menginginkan kebebasan dan terlepas dari pembagian peran yang tradisional.



BAB 3

PEREMPUAN DALAM DUNIA KERJA

Karena pada bab sebelumnya telah dijelaskan partisipasi perempuan dalam dunia kerja pada masa sebelum perang hingga akhir Perang Dunia II, maka pada bab ini akan dibahas partisipasi perempuan setelah Perang Dunia II hingga diterapkannya *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL) pada tahun 1985 dan bagaimana kondisi pekerja perempuan pada saat ini.

3.1 Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Sebelum Tahun 1985

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja sebelum tahun 1985 diklasifikasikan dalam dua bagian, yaitu pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi (1955-1973) dan pada masa pertumbuhan ekonomi rendah (setelah tahun 1973). Pengklasifikasian tersebut dikarenakan partisipasi perempuan Jepang dalam dunia kerja sangat dipengaruhi perkembangan ekonomi yang terjadi di Jepang.

3.1.1 Pada Masa Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (1955-1973)

Pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi atau yang biasa disebut *koudou keizai seichou* (高度経済成長), pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 10%. Hal ini dikarenakan adanya Perang Korea (1950-1953) dan hubungan Jepang dengan Amerika saat Perang Dingin. Kedua hal tersebut membawa keuntungan ekonomi bagi Jepang. Jepang memperoleh akses yang mudah untuk mendapat teknologi dan konsumen dari Amerika. Dengan akses yang diberikan oleh Amerika kepada eksportir Jepang, membantu menciptakan kemajuan ekonomi bagi Jepang (Gabriel, 1998). Dengan adanya Perang Korea, Jepang memiliki kesempatan untuk mengekspor barang-barang industri berat. Pada tahun 1960-an mobil, serat sintesis, dan produk elektronik baru seperti *tape recorder* masuk pula dalam daftar ekspor utama, menjadikan total ekspor Jepang pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Akibatnya, volume ekspor Jepang pada tahun 1960 meningkat kira-kira tujuh kali dalam periode tiga belas tahun berikutnya (Kunio, 1992:21).

Pada tahun 1965-1970, puncak dari pertumbuhan ekonomi Jepang, hampir setiap rumah tangga memiliki *rice cookers*, mesin cuci, kulkas, dan *vacuum-cleaners*. Hal ini menyebabkan naiknya investasi pabrik dan peralatan hingga 22% (Nakamura, 1985:75).

Pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi struktur tenaga kerja perempuan. Perubahan yang terjadi pada masa ini antara lain jumlah tenaga kerja perempuan, usia pekerja, dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Pada tahun 1960, jumlah tenaga kerja perempuan adalah 7.160.000 orang dan meningkat menjadi 10.840.000 orang pada tahun 1970. Usia pekerja pun mengalami perubahan. Pada masa sebelum pertumbuhan ekonomi tinggi (1950), persentase perempuan yang bekerja di kelompok usia 15-19 tahun adalah 54.5%; 62.7% pada kelompok usia 20-24 tahun; jumlah tersebut menurun pada kelompok usia 25-29 tahun, yaitu 48.2%; dan kembali meningkat pada kelompok usia 40-49 tahun, yaitu 53.1%.¹

Pada tahun 1970, persentase tenaga kerja pada kelompok usia 15-19 tahun adalah 35%; 69% pada kelompok usia 20-24 tahun; 44.1% pada kelompok usia 25-29 tahun; dan 63.4% pada kelompok usia 40-49 tahun.² Menurunnya persentase pada kelompok usia 15-19 tahun dikarenakan pada rentang usia tersebut jumlah perempuan yang melanjutkan pendidikan ke SMA semakin meningkat (1.935.118 orang pada tahun 1950 menjadi 4.231.542 pada tahun 1970).

Pekerja perempuan yang bekerja sebagai *full-timer* (正社員 – *seishain*), dengan pendidikan SMA atau akademi, biasa disebut “*sarary garu* [*salary girl*]” atau “*BGs* [*business girls*]”. Penggunaan kata “*girl*” menunjukkan sebagian besar dari mereka merupakan perempuan lajang, masih muda, dan biasanya berhenti bekerja ketika menikah (pada tahun 1958 masa kerja perempuan adalah 3.9 tahun dan pada tahun 1970 adalah 4.5 tahun). Tidak mengherankan jika perempuan disebut sebagai *shokuba no hana* (bunga di tempat kerja) – cantik untuk dilihat,

¹ Sakatou Mariko. *Nihon no Josei Seisaku*. (Japan: 2009). Hal. 41

² *Ibid.*

tetapi hanya untuk sementara waktu saja.³ Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja seumur hidup yang diterapkan perusahaan-perusahaan Jepang tidak berlaku bagi perempuan karena mereka harus berhenti bekerja saat menikah dan baru kembali bekerja saat anak-anak mereka telah mencapai usia sekolah.

Perubahan berikutnya adalah jenis pekerjaan yang dilakukan perempuan. Pada masa *koudou keizai seichou* terjadi industrialisasi dan urbanisasi. Hal ini menyebabkan jumlah *kazoku roudousha* berkurang karena masyarakat Jepang mulai meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan di kota. Dan karena pada masa ini pendapatan yang diperoleh suami cukup tinggi dan perempuan hanya bekerja hingga menikah, maka banyak perempuan yang menjadi ibu rumah tangga secara penuh (専業主婦 – *senyou shufu*). Pada tahun 1960, jumlah rumah tangga yang suami bekerja dan istri tidak bekerja adalah 11.140.000 sedangkan yang keduanya bekerja (共働き – *tomo bataraki*) hanya 6.140.000.⁴

Saat mencapai usia pertengahan 30 tahun atau saat anak-anak telah mencapai usia sekolah, istri akan kembali bekerja. Namun, mereka tidak dapat menjadi pekerja tetap (*seishain*) lagi sehingga mereka pun hanya bekerja sebagai *part-timer*. Hal ini dikarenakan sulit bagi perempuan untuk membagi waktu antara pekerjaan dan urusan rumah tangga jika mereka bekerja sebagai pekerja tetap. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

仕事と家庭・育児という二重・三重の責任をこなすためには、長時間拘束される可能性の高いフルタイムは主婦には負担です。⁵

Shigoto to katei, ikuji to iu nijuu, sanjuu no sekinin wo konasu tame ni ha, choujikan kousokusareru kanousei no takai furutaima ha shufu ni ha futan desu.

Terjemahan:

³ Sumiko Iwao. *Japanese Woman: Traditional Image & Changing Reality*. (New York: 1993). Hal. 155-156

⁴ Sakatou. *Op. Cit.* Hal.41

⁵ Satou Nobuko. *Josei Gaku: Ningenrashiku Ikirutameni*. (Japan:1999). Hal. 43

Tanggung jawab dalam pekerjaan, urusan rumah tangga, dan merawat anak membatasi istri untuk menjadi *full-timer*.

Pada tahun 1970, jumlah tenaga kerja perempuan yang menikah lebih banyak dibandingkan mereka yang belum menikah. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pekerja usia 15-19 tahun dan meningkatnya pekerja usia paruh baya. Pada tahun 1962, jumlah tenaga kerja perempuan yang belum menikah adalah 55.2% turun menjadi 48.3% pada tahun 1970. Sebaliknya, jumlah tenaga kerja yang telah menikah mengalami peningkatan dari 32.7% pada tahun 1962 menjadi 59.5% pada tahun 1970 (MHLW, 2010).

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah tenaga kerja yang telah menikah adalah perubahan dalam rumah tangga terutama dalam hal alat-alat elektronik yang digunakan. Akibat dari pertumbuhan ekonomi tinggi dan industrialisasi adalah munculnya barang-barang elektronik seperti mesin cuci, *rice-cooker*, dan kulkas. Dengan adanya barang-barang tersebut, pekerjaan rumah tangga menjadi lebih ringan sehingga para ibu memiliki waktu luang lebih banyak dan dengan banyaknya waktu luangnya yang mereka miliki tersebut, mereka memilih untuk menghabiskan waktu dengan bekerja di luar rumah. Hal inilah yang menyebabkan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang telah menikah.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada periode perekonomian tinggi, perempuan bekerja hanya dalam waktu singkat yaitu hingga mereka menikah atau melahirkan. Hal ini dikarenakan adanya paksaan dari perusahaan untuk mengundurkan diri saat mereka menikah atau melahirkan. Setelah itu, mereka akan menjadi *sengyou shufu* dan akan kembali bekerja sebagai *part-timer* setelah mencapai usia 35 tahun ke atas.

3.1.2 Pada Masa Pertumbuhan Ekonomi Rendah (Setelah tahun 1973)

Periode pertumbuhan yang cepat berakhir karena krisis minyak yang berawal pada bulan Oktober 1973. Tahap pertama krisis tersebut adalah embargo minyak yang dikenakan oleh Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada negara-negara industri. Karena embargo tersebut hanya berlangsung singkat, pengaruhnya hanya bersifat sementara, tetapi keputusan OPEC

menaikkan harga minyak tiga kali lipat ternyata berdampak lama. Karena Jepang hampir mengimpor seluruh minyak kebutuhannya (sekitar 90% kebutuhan energinya waktu itu), kenaikan harga minyak merupakan pukulan yang menghancurkan pada perekonomian Jepang. Untuk pertama kalinya, sejak Perang Dunia II, Produk Nasional Bruto menunjukkan tingkat pertumbuhan yang negatif (minus 1.3%) dalam tahun 1974.⁶

Pada tahun 1976, perekonomian Jepang meningkat menjadi di atas 5%. Namun, karena terjadi kenaikan harga minyak untuk kedua kalinya pada akhir tahun 1978, pertumbuhan ekonomi Jepang turun menjadi 4% pada tahun 1981 dan 3.3% pada tahun 1982-1983. Kemudian pada tahun 1984, kembali naik menjadi 5%.⁷

Tabel 3.1 – Persentase Tenaga Kerja di Jepang Berdasarkan Jenis Kelamin (1973-1985)

Tahun	Laki-Laki	Perempuan
1973	82.1	48.2
1974	81.8	46.5
1975	81.4	45.7
1976	81.2	45.8
1977	80.6	46.6
1978	80.3	47.4
1979	80.2	47.6
1980	79.8	47.6
1981	79.8	47.7
1982	79.5	48.0
1983	79.4	49.0
1984	78.8	48.9
1985	78.1	48.7

Sumber: *Kokumin Seikatsu Hakusho* (2006)

⁶ Yoshihara Kunio. *Pertumbuhan Ekonomi Jepang* (Jakarta: 1992), hal.22-23.

⁷ *Ibid.*

Dengan adanya krisis minyak tersebut, jumlah tenaga kerja – baik laki-laki maupun perempuan – mengalami penurunan. Dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga kerja laki-laki terus mengalami penurunan sejak krisis minyak tahun 1973, tetapi jumlah tenaga kerja perempuan – meskipun sempat mengalami penurunan – kembali mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan perubahan struktur ekonomi Jepang dari industri berat ke industri jasa.⁸ Perempuan yang bekerja di sektor jasa pun terus mengalami peningkatan, dari 2.950.000 orang pada tahun 1973 menjadi 3.880.000 orang di tahun 1980 (tabel 3.2).

Tabel 3.2 – Jumlah Tenaga Kerja Perempuan (*koyousha*) Berdasarkan Jenis Pekerjaan (dalam sepuluh ribu orang)

Tahun	Pertambangan	Konstruksi	Pemerintahan	Jasa
1973	1	52	31	295
1974	1	49	31	299
1975	1	49	31	312
1976	1	52	30	318
1977	1	53	33	334
1978	2	53	35	355
1979	1	57	36	374
1980	1	58	33	388

Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communications (2002)

Pada masa ini terjadi *roudouryoku no joseika* (労働力の女性化) atau *feminization of the labour force*. Yang dimaksud dengan *roudouryoku no joseika* adalah meningkatnya jumlah tenaga kerja perempuan dari jumlah keseluruhan tenaga kerja. Misalnya, di negara-negara maju, seperti Kanada dan Amerika, terjadi peningkatan presentase tenaga kerja perempuan pada tahun 1970-1990. Jumlah tenaga kerja perempuan di Kanada meningkat dari 43.2% menjadi 57.9% dan di Amerika dari 48.9% menjadi 56.5%. Namun, pada tahun 1970, 90% tenaga kerja perempuan pada kedua negara tersebut telah menjadi *koyousha* (雇用手 – tenaga kerja yang memiliki pendapatan) sehingga dapat dikatakan bahwa di

⁸ Yoko Kawashima. *Female Workers: An overview of Past and Current Trends* dalam Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future (Kumiko Fujimura-Fanselow & Atsuko Kameda eds., 1995) hal.277

negara-negara tersebut *roudouryoku no joseika* sama dengan *koyou no joseika*⁹ (雇用の女性化). Hal ini berbeda dengan Jepang, pada tahun 1970 persentase tenaga kerja perempuan adalah 49.9% dan pada tahun 1991 meningkat menjadi 50.7%. Pada tahun yang sama, jumlah *koyousha* di Jepang meningkat dari 54.7% menjadi 74%. Jadi, dapat dikatakan bahwa perubahan yang terjadi di Jepang bukan *roudouryoku no joseika* melainkan *koyou no joseika*.¹⁰

Tabel 3.3 – Distribusi Tenaga Kerja berdasarkan Status Pekerjaan (%)¹¹

Tahun	Perempuan			Laki-laki		
	Wirausaha	Pekerja Keluarga	Pegawai	Wirausaha	Pekerja Keluarga	Pegawai
1950	15.0	62.5	22.4	37.0	19.3	43.7
1955	14.7	57.7	27.6	34.0	18.8	47.2
1960	15.8	43.4	40.8	27.4	10.5	62.1
1965	14.5	36.8	48.6	23.4	7.8	68.8
1970	14.2	30.9	54.7	22.4	6.0	71.5
1975	14.3	25.7	59.8	20.1	3.9	75.8
1980	13.7	23.0	63.2	19.4	3.3	77.1
1985	12.5	20.0	67.2	17.9	2.8	78.9

Dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 1955, sebagian besar perempuan masih menjadi pekerja keluarga atau *kazoku roudousha* (57.7%) dan hanya 27.6% yang menjadi pegawai (*koyousha*). Namun, pada tahun 1970, jumlah *koyousha* mencapai separuh dari tenaga kerja perempuan (54.7%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja perempuan yang digaji semakin bertambah. Meskipun demikian, pada tahun 1970-an, pekerjaan yang tersedia bagi lulusan universitas hanya sedikit. Lulusan SMA dan akademi memiliki kesempatan yang lebih baik karena mereka masih muda dan dapat diatur. Kecuali bagi mereka yang memilih pekerjaan dalam bidang pendidikan atau pemerintahan, bagi perempuan yang sedang mencari pekerjaan, pendidikan tinggi lebih terlihat

⁹ *Koyou no joseika* adalah meningkatnya *koyousha* dari seluruh jumlah tenaga kerja perempuan.

¹⁰ Takenaka Emiko. *Roudouryoku no Joseika* (1994). Hal.5

¹¹ Kawashima. *Op. Cit.* Hal.274

sebagai halangan daripada keuntungan.¹² Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah lulusan SMA yang bekerja dibandingkan lulusan universitas. Persentase pada tahun 1970 yaitu 61.2% untuk lulusan SMA dan 59.9% untuk lulusan universitas (MEXT, 2010).

Sebagian besar tenaga kerja perempuan pada masa ini masih sama seperti pada masa *koudou keizai sechou*, yaitu terkonsentrasi pada kelompok usia 20-24 tahun; menurun pada usia 25-29 tahun; dan kembali meningkat pada usia 35 tahun. Pada tahun 1973, persentase pada kelompok usia 20-24 tahun adalah 67.3%; 44.4% pada kelompok usia 25-29 tahun; dan 56.1% pada kelompok usia 35-39 tahun (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2010).

Miller (2002) menyebutkan bahwa sebelum diterapkannya *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL) atau Hukum Persamaan Kesempatan Kerja, sebagian besar perempuan bekerja sebagai *office lady* (OL). Bukan hanya karena belum ada perempuan yang menempati posisi sebagai *manager*, tetapi juga karena lebih mudah bagi lulusan SMA atau akademi (*tanki daigaku*) untuk menemukan pekerjaan karena waktu mereka bekerja – sebelum menikah – lebih lama dibandingkan mereka yang lulusan universitas.

Hal ini menunjukkan bahwa sebelum diterapkannya EEOL terdapat perbedaan yang mencolok antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak mendapat kesempatan untuk bekerja layaknya laki-laki, mereka hanya melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Selain itu, lulusan universitas pun mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan karena sebagian besar perusahaan lebih memilih untuk mempekerjakan lulusan SMA atau *tanki daigaku*.

3.2 Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja Setelah Tahun 1985

Pada tahun 1985 diterapkan Hukum Persamaan Kesempatan Kerja bagi perempuan dan laki-laki, yaitu 男女雇用機会均等法 (*danjo koyou kikai kintouhou*) atau *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL), tetapi hukum ini baru berjalan efektif pada tahun 1986. Hukum ini diterapkan karena adanya

¹² Iwao. *Op. Cit.* Hal. 40.

gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak pada tahun 1970-an dan adanya kritik dari luar Jepang tentang diskriminasi terhadap perempuan. Hasilnya, para pejabat Jepang mulai membuat hukum dan aturan yang melarang diskriminasi terhadap perempuan dan pada tahun 1980 pemerintah Jepang menandatangani *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Hal-hal yang terkandung dalam EEOL adalah sebagai berikut.¹³

- a) Larangan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam hal *recruitment*. Hal ini tertuang dalam pasal 5, yaitu:

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわらず均等な機会を与えなければならない。

Jigyounushi ha, roudousha no boshuu oyobi saiyou ni tsuite, sono seibetsu ni kakawarinaku byoudou na kikai wo atae nakerebanaranai.

Terjemahan:

Pemilik usaha harus memberikan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan dan penerimaan tenaga kerja tanpa memandang jenis kelamin.

- b) Larangan diskriminasi dalam hal penempatan dan promosi (pasal 6), yaitu:

事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。

Jigyounushi ha, tsugi ni kakageru jikou nit suite, roudousha no seibetsu wo riyuu toshite, sabetsuteki toriatsukai wo shitehanaranai.

- 一 労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練

Roudousha no haichi (gyoumu no haibun oyobi kengen no fuyo wo fukumu). Shoshin, koukaku oyobi kyouiku kunren.

- 二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生措置であつて厚生労働省令で定めるもの

¹³ <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>

*Juutaku shikin no kashitsuke sonota ni kore ni junzuru fukuri
kousei no sochi de astute kouseiroudoushourei de kimeru
mono.*

三 労働者の職種及び雇用形態の変更

Roudousha no shokushu oyobi koyou keitai no henkou.

四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

*Taishoku no kanshou, teinen oyobi kaiko narabi ni roudou
keiyaku no koushin.*

Terjemahan:

Pemilik usaha tidak diperkenankan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap pekerja berdasarkan jenis kelamin dalam hal-hal yang disebutkan di bawah ini:

1. Penugasan (termasuk pembagian tugas dan mengakui hak pekerja); promosi; penurunan pangkat; dan pelatihan pekerja.
2. Pinjaman untuk cicilan rumah dan hal-hal lainnya yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.
3. Perubahan jenis pekerjaan dan status pekerja.
4. Desakan untuk berhenti bekerja berdasarkan usia dan pembaruan kontrak kerja.

- c) Larangan untuk memberikan perlakuan yang tidak menguntungkan bagi perempuan dengan alasan pernikahan, kehamilan, dan melahirkan (pasal 9):

事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

*Jigyounushi ha, josei roudousha ga kon'inshi, ninshinshi, mata ha shussan
shita koto wo taishoku riyuu toshite yotei suru sadame wo shite ha naranai.*

Terjemahan:

Pemilik usaha tidak diperkenankan menetapkan pernikahan, kehamilan, dan melahirkan sebagai alasan untuk memecat pekerja perempuan.

Selain EEOL, aturan tentang persamaan hak dalam pekerjaan pun terdapat dalam *roudou kijun hou* (労働基準法 – undang-undang ketenagakerjaan) 1947, yaitu pada pasal 3:

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。¹⁴

Shiyousha ha, roudousha no kokuseki, shinjou mata ha shakai teki mibun wo riyuu toshite, chingin, roudou jikan sonota no roudou jouken nit suite, sabetsu teki tori atsukai wo shite ha naranai.

Terjemahan:

Pemberi kerja tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal upah kerja, jam kerja, atau kondisi kerja lainnya dengan alasan kebangsaan, kepercayaan, atau status sosial pekerja.

Menurut Miller (2002), jumlah tenaga kerja perempuan di Jepang semakin meningkat terutama sejak diterapkannya EEOL.

“Women have made progress in the area of employment, partially due to the 1985 Equal Employment Opportunity Law (EEOL)”

Terjemahan:

“Perempuan membuat kemajuan pada pekerjaan, khususnya setelah diterapkannya Hukum Persamaan Kesempatan Kerja tahun 1985.”

Sejak diberlakukannya EEOL, untuk pertama kalinya, perusahaan tidak lagi membedakan penerimaan pekerja perempuan dan laki-laki.¹⁵ Iwao (1993) mengungkapkan bahwa setelah adanya EEOL, beberapa perusahaan besar mulai menawarkan dua jalur pekerjaan (*ippan shoku* dan *sougou shoku*) pada perempuan lulusan universitas. Empat puluh sembilan persen perusahaan (dengan jumlah pekerja di atas 50.000 orang) dan 1.4% perusahaan dengan jumlah pekerja 30-99 orang telah mengadopsi sistem ini.¹⁶

Selain dibukanya sistem dua jalur, perubahan lain yang terjadi adalah meningkatnya tenaga kerja lulusan universitas. Hal ini dapat dilihat dari semakin

¹⁴ *Ibid.*

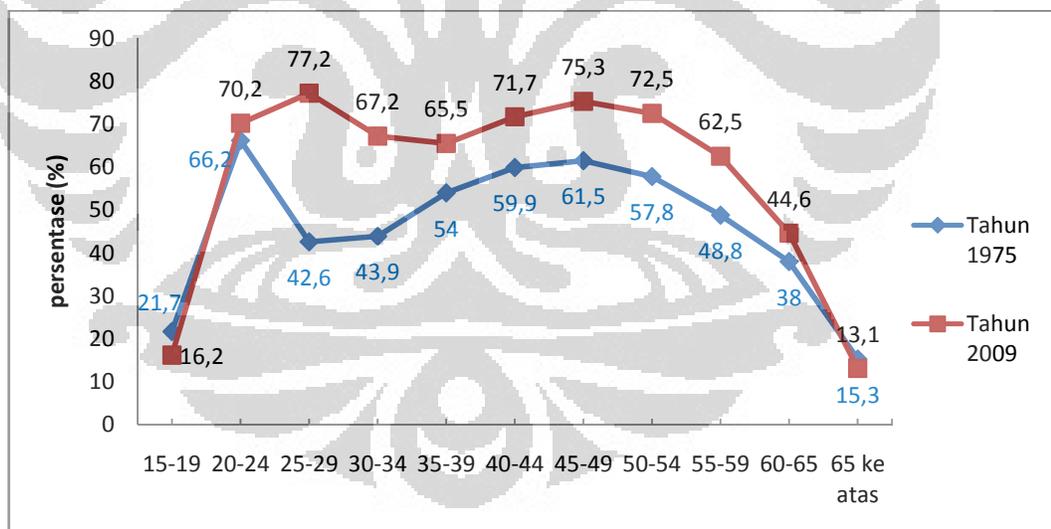
¹⁵ Robbi Louise Miller. *The Quite Revolution: Japanese Women Working around the Law* (New York: 2002). Hal. 167

¹⁶ Kawashima. *Op. Cit.* Hal.286

meningkatnya jumlah lulusan universitas yang masuk dalam dunia kerja. Pada tahun 1980 jumlah lulusan SMA yang bekerja adalah 60.6%; lulusan akademi 22.5%; dan universitas 1.7%. Pada tahun 2010, jumlah tersebut menjadi 25.6%, 16.1%, dan 57.8% (MEXT, 2010).

Perubahan tersebut menyebabkan kurva M ikut mengalami perubahan. Pada tahun 1975, puncak pertama ada pada kelompok usia 20-24 tahun (66.2%) dan titik terendah ada pada kelompok usia 25-29 tahun (42.6%), tetapi pada tahun 2009 puncak kurva berada pada kelompok usia 25-29 tahun (77.2%) dan mencapai dasar pada kelompok usia 35-39 tahun (65.5%). Hal ini dikarenakan perubahan *life style* perempuan Jepang. Pada tahun 1975, MAFM perempuan adalah 24.7 tahun sehingga pada usia 25 tahun jumlah tenaga kerja perempuan menurun karena mereka menikah dan berhenti bekerja. Sedangkan pada tahun 2009, MAFM perempuan adalah 28.6 tahun sehingga kurva mencapai dasar bukan pada kelompok usia 25-29 tahun, melainkan pada usia 30-an.

Grafik 3.1 - Persentase Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Usia



Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communications (2010)

Menurut Hirota Hisako (1987)¹⁷, ada tiga tipe pekerja perempuan di Jepang berdasarkan usia dan lamanya bekerja, yaitu:

1. *Young workers*: pada pertengahan tahun 1980, tipe pekerja ini memenuhi sepertiga pekerja perempuan di Jepang yang berusia di bawah 30 tahun. Mereka memiliki pendidikan yang baik dan sebagian besar bekerja sebagai *full-timer* dengan kondisi pekerjaan yang lebih baik dibandingkan mereka yang *middle-aged*. Sebagian besar dari mereka memilih berkarir daripada menjadi ibu rumah tangga, atau bahkan tidak menikah sama sekali. Bagi mereka, kebebasan adalah sesuatu yang berharga dan mereka adalah orang-orang yang mendukung persamaan derajat. Selain itu, mereka juga lebih memilih “sistem berdasarkan keahlian” daripada “sistem senioritas” untuk kemajuan dalam bekerja.
2. *Career Women*: usia mereka lebih dari 30 tahun dengan kontinuitas kerja di atas sepuluh tahun dan jumlahnya memenuhi 25% dari jumlah total pekerja perempuan. Secara umum, mereka telah mematahkan pandangan tradisional Jepang di mana “pekerjaan perempuan adalah di rumah dan mengurus keluarga serta anak”.
3. *Middle-Aged Recruits*: usia mereka lebih dari 30 tahun, tetapi dengan kontinuitas kerja kurang dari 10 tahun. Sebagian besar dari mereka adalah *part-timer*.

Dari klasifikasi di atas, dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi pekerja perempuan adalah *young workers*, kemudian diikuti oleh *career women* dan sebagian besar dari mereka adalah *seisha'in*. Pada bulan Februari 2012, jumlah *young workers* (20-24 tahun) yang bekerja sebagai *seisha'in* adalah 1.350.000 orang sedangkan yang bekerja sebagai *temporary employee* (臨時工 - *rinjikou*) adalah 430.000 orang. Pada kelompok usia 30-34 tahun yang bekerja sebagai *seisha'in* adalah 2.070.000 orang dan yang bekerja sebagai *rinjikou* berjumlah 340.000 orang.¹⁸ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah *seisha'in* semakin meningkat sesuai dengan kelompok usia. Hal ini menunjukkan

¹⁷ Hirota Hisako. “Japanese Women Today”. *International Society for Educational Information* (1987) dalam Lilia Dimova *Working Women in Japan* (Tokyo: 1998), hal. 53-54.

¹⁸ Ministry of Health, Labor, and Welfare (Februari 2012)

perempuan yang memilih untuk meneruskan bekerja dibandingkan menikah semakin meningkat karena perempuan yang menikah dan kembali bekerja akan sulit untuk mendapat pekerjaan sebagai *seisha'in*.

Meskipun EEOL terlihat mendukung adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, tetapi hukum tersebut tetap memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Hal ini menyebabkan tetap adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal pendapatan yang diterima pekerja.

Tabel 3.4 – Pendapatan Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Usia (2009)
(dalam seribu yen)

Usia	Pekerja Tetap		Pekerja Tidak Tetap	
	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki
~ 19	162.6	174.1	147.3	151.8
20 ~ 24	194.4	203.1	162.5	172.0
25 ~29	222.2	240.8	179.1	198.3
30 ~ 34	242.7	283.0	183.6	217.4
35 ~39	257.6	326.9	181.7	231.5
40 ~ 44	270.4	377.2	172.2	232.4
45 ~49	275.2	417.2	170.5	235.7
50 ~ 54	272.3	427.2	165.3	244.4
55 ~ 59	260.4	405.7	160.5	251.3
60 ~ 64	238.5	305.3	163.1	251.3
65 ~ 69	229.0	299.2	155.4	223.8
70 ~	237.1	294.3	153.8	194.7

Sumber: MHLW (2009)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa gaji yang diterima perempuan, baik pekerja tetap maupun pekerja tidak tetap, selalu lebih rendah daripada laki-laki. Perbedaan itu semakin besar pada setiap kelompok usia. Pada kelompok usia 20-24 tahun perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki pada pekerjaan tetap adalah 8.7 ribu yen dan pada pekerja tidak tetap 9.5 ribu yen. Pada kelompok usia

30-34 tahun perbedaan tersebut menjadi 40.3 ribu yen dan 33.8 ribu yen. Selain itu, dengan semakin besarnya gaji berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa sistem senioritas masih berlaku dalam perusahaan Jepang. Selain itu, sistem kerja seumur hidup yang diterapkan perusahaan-perusahaan Jepang pun tidak sesuai dengan kondisi kerja perempuan karena mereka harus berhenti bekerja saat menikah atau pun saat melahirkan.

Meskipun EEOL belum sepenuhnya memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan, diterapkannya hukum tersebut merupakan langkah awal bagi perempuan untuk memasuki dunia kerja dengan mendapat perlakuan yang sama seperti laki-laki. Perubahan utama yang terjadi setelah diterapkannya hukum ini adalah dibukanya sistem dua jalur dan mulai diterimanya perempuan lulusan universitas. Selain itu, dengan adanya EEOL, telah meningkatkan kesadaran perempuan akan persamaan hak. Mereka pun tidak lagi hanya bekerja di rumah. Bahkan saat ini banyak di antara mereka yang memilih menjadi *career women* dan menunda pernikahan.

3.3 Hubungan antara Partisipasi Perempuan dalam Dunia Kerja dengan *Bankonka*

Dari beberapa penyebab *bankonka*, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan salah satu faktor yang paling dominan. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan Akihiko Kato (2011), yaitu.

晩婚化の主因を女性の全般的な地位向上と経済的自立にともめる議論「女性の自立仮説」が依然として主流であること。

Bankonka no shu'in wo josei no zenpan teki na chi'i koujou to kezai teki jiritsu ni motomeru giron "josei no jiritsu" ga izen toshite shuryuu de aru koto.

Terjemahan:

Penyebab *bankonka* secara general adalah kemandirian ekonomi dan status perempuan yang semakin tinggi atau yang disebut "hipotesis kemandirian perempuan" yang masih menjadi isu utama.

Selain Akihiko Kato, Oppenheimer (1988) dalam tulisannya yang berjudul *A Theory of Marriage Timing*, juga mengemukakan hal yang sama.

“A decline in gains to marriage owing to the increase in women's economic independence is the preeminent factor in the recent rise in delayed marriage.”

Terjemahan:

“Menurunnya keinginan untuk menikah adalah dampak dari meningkatnya kemandirian ekonomi perempuan yang merupakan penyebab utama meningkatnya penundaan pernikahan.”

Dari kedua pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa kemandirian perempuan dalam hal ekonomi merupakan faktor utama penundaan pernikahan. Kemandirian ekonomi yang dimaksud adalah semakin meningkatnya jumlah perempuan yang bekerja dan memperoleh gaji yang cukup sehingga mereka merasa pernikahan hanya akan menghambat karir mereka.

Pandangan perempuan terhadap pekerjaan pun perlahan mengalami perubahan. Pandangan bahwa perempuan tidak perlu bekerja mengalami penurunan (4.1% pada tahun 1992 menjadi 3.6% pada tahun 2007). Sebaliknya, perempuan yang tetap ingin bekerja meskipun telah memiliki anak semakin meningkat (23.4% pada tahun 1992 menjadi 43.4% pada tahun 2007).¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai keinginan untuk bekerja sekaligus menunjukkan bahwa perempuan tidak ingin lagi terikat oleh aturan-aturan tradisional yang mengharuskannya tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga. Jika diklasifikasikan berdasarkan usia, perempuan pada kelompok usia 20-29 tahun yang setuju dengan pernyataan “perempuan tidak perlu bekerja” hanya 0.6%, diikuti dengan kelompok usia 30-39, yaitu 1.2%.²⁰ Rendahnya persentase tersebut karena pada rentang usia tersebut, perempuan sedang meniti karir sehingga mereka menganggap bahwa bekerja adalah suatu kepentingan bagi mereka.

¹⁹ Naikakufu (2009)

²⁰ *Ibid.*

Tabel 3.5 – Pandangan Perempuan terhadap Pekerjaan Berdasarkan Pekerjaan dan Status Pernikahan (2009)

(Dalam persen)

	Jenis Pekerjaan			Status Pernikahan		
	Wira-usaha	Pekerja Keluarga	Pegawai	Belum Menikah	Menikah	Janda/Cerai
Tidak Perlu bekerja	3.4	2.1	1.8	2.5	2.8	6.1
Bekerja hingga menikah	2.3	6.2	2.4	2.5	4.9	6.5
Bekerja hingga memiliki anak	4.6	11.3	5.0	10.8	6.5	13.9
Tetap bekerja meskipun memiliki anak	57.5	43.3	58.2	49.3	47.8	44.6
Kembali bekerja setelah anak dewasa	28.7	37.1	31.6	32.5	36.1	25.1
Lainnya	1.1	-	0.4	1.0	0.8	0.4
Tidak tahu	2.3	-	0.6	1.5	1.1	3.5

Sumber: 内閣府(Naikakufu – Cabinet Office)

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa perempuan cenderung memilih tetap bekerja meskipun memiliki anak dan persentase terbesar terdapat pada perempuan yang bekerja sebagai pegawai (58.2%) dan pada perempuan yang masih lajang (49.3%). Dan karena mereka memilih untuk tetap bekerja, persentase perempuan yang berpendapat tidak perlu bekerja pun cukup rendah (1.8% untuk pegawai dan 2.5% untuk yang masih lajang).

Selain jumlah tenaga kerja yang terus meningkat, posisi perempuan dalam perusahaan pun mulai meningkat. Pada tahun 1990, hanya 1.1% perempuan yang menempati posisi sebagai *buchou* (direktur / kepala divisi). Jumlah tersebut meningkat menjadi 4.2% pada tahun 2010. Sedangkan jumlah perempuan yang menempati posisi sebagai *kachou* (manajer) pada tahun 1990 adalah 2% dan menjadi 7% pada tahun 2010. Meskipun jumlah tersebut masih terbilang sedikit, tetapi hal ini memberi dampak yang signifikan pada peningkatan jumlah perempuan yang belum menikah. Pada tahun 1990, jumlah perempuan yang bekerja dan belum menikah adalah 55.2% dan pada tahun 2010 jumlah tersebut

meningkat menjadi 63.4% (Ministry of Internal Affairs and Communications, 2010).

Ketika perempuan telah mencapai usia 25 tahun dan belum menemukan pasangan, mereka akan mengalihkan perhatian pada hal lain, seperti pekerjaan dan hobi. Hasilnya, pernikahan tidak lagi menjadi obsesi mereka. Dan ketika mereka telah melewati usia 30 tahun, mereka akan berupaya untuk tidak peduli pada usia mereka dan tekanan sosial yang ada. Pada usia tersebut, mereka telah memiliki pekerjaan dan pendapatan yang memadai. Meskipun mereka telah mencapai usia 30 tahun dan berpikir untuk menikah, tetapi mereka tidak ingin penantian mereka selama ini hanya untuk laki-laki yang tidak memenuhi kualifikasi mereka dalam hal pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan.²¹

Dengan memiliki pendapatan sendiri, perempuan tidak hanya mendapat kemandirian secara ekonomi, tetapi juga memperoleh kepercayaan diri. Mereka tahu bahwa mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak perlu menikah untuk mendapat kehidupan yang mapan secara ekonomi atau mengorbankan keinginan mereka demi keluarga.²² Kumiko (1985) juga menyebutkan bahwa ada indikasi pada perempuan yang memiliki pendapatan yang cukup untuk memilih karir sebagai alternatif yang realistis dibandingkan pernikahan.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka pandangan “男性は外で働き、女性は家庭を守るべきだ” (*dansei ha soto de hataraki, josei ha katei wo mamoru beki da* – laki-laki bekerja di luar dan perempuan mengurus rumah tangga) pun mulai berubah. Pada tahun 1978, 50.4 % setuju dengan pernyataan tersebut. Namun, pada tahun 1998 hanya 18.4 % yang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi ingin terikat oleh aturan-aturan tradisional yang membatasi gerakannya. Perempuan masa kini tidak ingin hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga tanpa mendapat pendidikan dan pekerjaan seperti pada masa sebelum perang, tetapi mereka juga ingin memiliki kebebasan sendiri untuk menentukan masa depannya.

²¹ Iwao. *Op. Cit.* hal. 61-62.

²² *Ibid.* hal.28

Selain itu, dengan semakin mandirinya perempuan akan mengurangi keuntungan pernikahan (baik hanya prasangka atau pun realita) karena perempuan akan mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan (Ono 2003; Raymo 2003; Tanaka 1995).

Penundaan pernikahan yang terjadi berbeda-beda tergantung pada pekerjaan si perempuan. Hal ini dapat dilihat dari usia rata-rata pada pernikahan yang berbeda tergantung pada jenis pekerjaan. Dari tabel 3.6 dapat diketahui bahwa MAFM tertinggi perempuan ada pada “*management*” yaitu 31.6 tahun dan terendah ada pada “*service*” dan “*security*” yaitu 27.3 tahun. Hal ini menunjukkan semakin tinggi posisi perempuan dalam pekerjaan, semakin tinggi pula kecenderungan untuk menunda pernikahan. Hal ini berkaitan pula dengan pendapatan yang diperoleh perempuan. Semakin tinggi posisi dalam pekerjaan, semakin besar pula pendapatan yang dia peroleh. Pada tahun 2010, upah kerja perempuan pada bidang *service* adalah 201.8 ribu yen sedangkan pada bidang *finance* 252 ribu yen.

Tabel 3.6 – Usia Rata-Rata pada Pernikahan Pertama berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Specialist	30.2	28.6
Management	35.0	31.6
Klerikal	31.0	29.1
Sales	29.8	27.8
Service	28.8	27.3
Security	28.8	27.3
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.1	28.1
Transportasi dan Komunikasi	30.2	28.8
Production Process	29.0	27.4

Sumber: MHLW (2005)

Pada tahun 1989, dari penelitian tentang perempuan yang bekerja sebagai manajer di perusahaan besar, dilaporkan bahwa satu dari empat perusahaan besar telah mempekerjakan perempuan dalam posisi lebih tinggi dari *kachou*, tetapi

terdapat perbedaan dari setiap industri. Perusahaan asuransi dan keuangan memiliki persentase tertinggi (58% perempuan bekerja sebagai manajer) dan perusahaan konstruksi memiliki persentase terendah (16%). Jika dirata-rata ada delapan manajer perempuan dalam setiap perusahaan dimana 52% di posisi administrasi, 34% sebagai *sales*. Dan yang perlu dicatat adalah 59% dari mereka adalah lajang dan 36% tidak memiliki anak.²³

Hal ini menunjukkan bahwa sangat sulit bagi perempuan untuk membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan mereka – yang berada di posisi manajer – bekerja dalam waktu yang cukup panjang; 25% dari mereka mengaku bekerja lebih dari 10 jam per hari. Meskipun jumlah perempuan yang bekerja sebagai manajer masih sedikit, tetapi mereka menunjukkan dengan sungguh-sungguh bahwa mereka mampu bekerja dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan biasanya berakhir dengan mengorbankan kehidupan pribadi mereka. Hal inilah yang menyebabkan mereka mendahulukan pekerjaan dibandingkan keluarga.²⁴

Dari data-data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kaitan antara peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan dengan penundaan usia pernikahan, yaitu dengan semakin banyaknya perempuan yang memiliki karir yang menjanjikan dengan upah kerja yang cukup, maka keinginan mereka untuk menikah semakin berkurang. Hal ini disebabkan sulitnya mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan jika mereka menikah dan memiliki anak. Hasilnya, usia rata-rata pada pernikahan pertama pada perempuan semakin meningkat, terutama mereka yang memilih jalur karir.

²³ *Ibid.* hal.194

²⁴ *Ibid.*

BAB 4

KESIMPULAN

Bagi sebagian orang, pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan karena dengan menikah mereka akan memiliki keluarga dan menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai. Namun, bagi sebagian yang lain, pernikahan merupakan suatu bentuk pengekangan terhadap kebebasan. Di Jepang, pandangan terhadap pernikahan mengalami perubahan sehingga jumlah pernikahan di Jepang terus mengalami penurunan dan menurunnya jumlah pernikahan tersebut bukan disebabkan oleh semakin banyaknya orang yang tidak mau menikah, melainkan meningkatnya *bankonka*. *Bankonka* adalah fenomena penundaan usia menikah yang terjadi di Jepang di mana terjadi peningkatan usia rata-rata pada pernikahan pertama dan *bankonka* banyak terjadi pada perempuan. Meningkatnya jumlah perempuan yang menunda pernikahan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain berubahnya pandangan terhadap pernikahan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mendapat pendidikan, dan semakin meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki dunia kerja. Dari ketiga hal yang melatarbelakangi meningkatnya *bankonka* tersebut, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan faktor utama penyebab *bankonka*.

Pada masa Meiji, berlaku sistem *ie* dimana posisi laki-laki sangat dominan karena pada saat itu berlaku sistem patriarkat dalam masyarakat Jepang. Pada masa ini, pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan silsilah keluarga dan melanggengkan sistem *ie*. Hal ini menyebabkan tingkat pernikahan cukup tinggi. Namun, dalam sistem *ie*, hak individu tidak diakui karena perempuan tidak berhak menentukan pasangan hidupnya sendiri sehingga sebagian besar pernikahan yang terjadi pada masa ini adalah *mi'ai kekkon*. Selain itu, gerakan perempuan dibatasi dengan adanya pandangan “perempuan bekerja di rumah, laki-laki bekerja di luar”. Jika mereka bekerja pun, mereka hanya bekerja di sektor primer sebagai *kazoku roudousha* yang tidak mendapatkan upah kerja. Perempuan mulai bekerja di sektor sekunder saat pemerintah Meiji membangun industri pemintalan dan industri tekstil pada

pertengahan tahun 1870. Namun, alasan mereka bekerja bukan sebagai wujud aktualisasi diri, melainkan untuk membantu perekonomian keluarga.

Pada masa setelah Perang Dunia II, dengan adanya perubahan dalam perekonomian Jepang, partisipasi perempuan dalam dunia kerja pun mengalami perubahan. Pada masa pertumbuhan ekonomi tinggi, sebagian besar perempuan hanya bekerja hingga mereka menikah atau melahirkan. Lalu, mereka akan menjadi *senyou shufu* (ibu rumah tangga) dan akan kembali bekerja saat mencapai usia di atas 30 tahun. Selanjutnya, pada masa perekonomian rendah, persentase perempuan dalam dunia kerja mengalami penurunan, tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama karena adanya perubahan ekonomi Jepang dari manufaktur ke industri jasa. Dalam industri jasa, sebagian besar pekerja yang diperlukan adalah perempuan. Oleh karena itu, persentase pekerja perempuan mengalami peningkatan kembali, terutama yang bekerja sebagai pegawai (*koyousha*). Berbeda dengan *kazoku roudousha*, perempuan yang bekerja sebagai *koyousha* memiliki upah kerja.

Perubahan selanjutnya adalah saat diterapkannya *Equal Employment Opportunity Law* (EEOL) pada tahun 1985. Dengan diterapkannya hukum tersebut, perempuan memiliki kesempatan untuk memilih jalur kerja yang mereka inginkan, yaitu jalur *ippan shoku* atau jalur *sougou shoku*. Hal ini merupakan langkah awal bagi perempuan untuk memperoleh posisi yang sama seperti laki-laki dalam hal penerimaan dan promosi. Dengan meningkatnya *koyousha* dan dibukanya jalur *sougou shoku*, jumlah perempuan yang mandiri secara finansial pun meningkat. Kemandirian ekonomi menyebabkan perempuan enggan untuk menikah karena dia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan enggan untuk melepas kebebasan yang dia miliki sebagai lajang. Hal ini dikarenakan perempuan akan mengalami kesulitan dalam mengatur keseimbangan antara keluarga dan pekerjaan sehingga perempuan yang bekerja cenderung untuk menunda pernikahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Akiko, Iwama. "Bankonka to Mikonka no Raifu Sutairu". *Journal of Population Problems* (1999): 39-58.
- Anwar, Ansar. *Peranan Fukuzawa Yukichi dalam Memodernisasi Pendidikan Jepang pada Zaman Meiji*. Bogor: Mahirini Press, 1999.
- Atoh, Makoto. "Very Low Fertility in Japan and Value Change Hypotheses". *Review of Population and Social Policy*, No. 10 (2001): 1-21.
- Dimova, Lilia. *Working Women in Japan*. Tokyo: Japan Foundation, 1998.
- Fujiwara-Fanselow, Kumiko & Atsuko Kameda. *Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present and Future*. New York: The Feminist Press, 1995.
- Fujimura-Fanselow, Kumiko. "College Women Today: Option and Dilemmas". dalam *Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future* (Kumiko Fujimura-Fanselow & Atsuko Kameda). New York: The Feminist Press, 1995. 125-153.
- . "Women's Participation in Higher Education in Japan". *Comparative Education Review*, Vol. 29 No. 4 (1985): 471-489.
- Hara, Kimi. "Challenges to Education for Girls and Women in Modern Japan: Past and Present" dalam *Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future* (Kumiko Fujimura-Fanselow & Atsuko Kameda). New York: The Feminist Press, 1995. 93-105.
- Hunter, Janet. "Japanese Women at Work (1880-1920)". *History Today*, Vol.43, 1993.
- Inoue, Teruko. *Josei Gaku Jiten*. Japan: Iwanami Shoten, 2002.
- Inoue, Teruko & Ehara Yumiko. *Josei no Deeta Bukku (Vol.1)*. Tokyo: Yuhikaku, 1990.
- . *Josei no Deeta Bukku (Vol.4)*. Tokyo: Yuhikaku, 2005.

- Iwao, Sumiko. *Japanese Woman: Traditional Image and Changing Reality*. New York: The Free Press, 1993.
- Takeuchi, Junichirou. "Bankonka-Hikonka no Haigo ni, yori Shinkoku na Dansei Jakunensou no (teikonka) ari". *Japan Center for Economic Research*, 2011.
- Kato, Akihiko. "The Postponement of Marriage, Socioeconomic Stratification, and The Decline in Economic Growth". *Japanese Journal of Family Sociology*, 13:1(2001), 47-58.
- , "Mikonka wo Oshi Susumete kita Futatsu no Chikara: Keizai Seichou no Teika to Kojin Shuugi no Ideorogi". *Journal of Population Problems*, 67-2(2011), 3-39.
- Kawashima, Yoko. "Female Workers: An overview of Past and Current Trends" dalam *Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future* (Kumiko Fujimura-Fanselow & Atsuko Kameda). New York: The Feminist Press, 1995. 271-292.
- Kingston, Jeff. *Contemporary Japan: History, Politic, and Social Changes since 1980s*. United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2011.
- Kumagai, Fumie. *Unmasking Japan Today*. London: Praeger, 1996.
- Kunio, Yoshihara. *Pembangunan Ekonomi Jepang (ed. II)*. Jakarta: University of Indonesia Press, 1992.
- Lebra, Takie Sugiyama. *Japanese Women: Constraint and Fulfillment*. Honolulu: University of Hawaii Press, 1984.
- Metzler, Mark. "Woman's Place in Japan's Great Depression: Reflection on the Moral Economy of Deflation". *Journal of Japanese Studies* Vol. 30, No. 2 (2004): 315-352.
- Miller, Robbi Louise. *The Quite Revolution: Japanese Women Working around the Law*. New York: Harvard Law School, 2002.
- Nakamura, Takafusa. *Perkembangan Ekonomi Jepang Moderen*. Tokyo: Departemen Luar Negeri Jepang, 1985.

- Nakamura, Masanori. *Technology Change and Female Labour in Japan*. Tokyo: United Nations University Press, 1994.
- Noll, Tamiko Ortega. *Pragmatic Single: Being an Unmarried Woman in Contemporary Japan*, 2004.
- Ono, Aki, et al., ed. "Gendai no Bankonka-Mikonka". *ISFJ*, 2005.
- Ono, Hiromi. "Women's Economic Standing, Marriage Timing, and Cross-National Context of Gender." *Journal of Marriage and Family* 65 (2003): 275-86.
- Oppenheimer. "A Theory of Marriage Timing". *American Journal of Sociology*, 1998.
- Raymo, James M. "Later Marriages or Fewer? Changes in the Marital Behavior of Japanese Women". *Journal of Marriage and Family*, Vol. 60 No. 4 (1998): 1023-1034.
- Sakatou, Mariko. *Nihon no Josei Seisaku*. Japan: Minerva Publishing, 2009.
- Satou, Nobuko. *Josei Gaku: Ningen Rashiku Ikiru Tameni*. Japan: Naogakusha, 1999.
- Takahashi, Shigesato. "Attitudes toward Marriage and the Family among the Unmarried Japanese Youth". *Journal of Population and Social Security*, Vol.1 No.1 (1997).
- Takenaka Emiko. *Roudouryoku no Joseika*. Japan, 1994.
- Takenori, Inoki. *Josei to Kazoku*. Japan: Dokuuri Shinbunsha, 1995.
- Tanaka, Kazuko. "Work, education, and the Family" dalam *Japanese Women: New Feminist Perspectives on the Past, Present, and Future* (Kumiko Fujimura-Fanselow & Atsuko Kameda). New York: The Feminist Press, 1995. 295-306.
- Tobing, Ekayani. *Keluarga Tradisional Jepang dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Depok: ILUNI KWJ, 2006.

Tsutsui, Junya. "Factors of Late Marriage: A Survival Analysis of Life Courses for Marriage in Japan". *NUCB Journal of Economics and Information Science*, Vol. 49 No. 2.

Wulandari, Endah H. "Domestikasi Perempuan Melalui Doktrin Ryousaikenbo: Tinjauan Umum Kebijakan Pemerintah Meiji". *Nikken*, Tahun VII, No.1.

----- . "Gerakan Feminisme Jepang: Studi tentang Gerakan Protes Ketidakadilan terhadap Perempuan pada Awal Zaman Modern". *Wacana*, Vol.5 No.1 (2003).

----- . "Perempuan dalam Dinamika Pendidikan: Berkisar Masalah Peranan Jender". *Nikken*, Vol.7 No.1.

Publikasi Elektronik:

Gabriel, Satya J. *Japanese Economic Crisis -- Expectations for Future Growth?*, November 1998. Diunduh tanggal 16 Maret 2012.

<<http://www.mtholyoke.edu/courses/sgabriel/japancrisis.htm>>

Japan. *Mikonka-Bakonka Houkokusho*. Diunduh tanggal 3 Mei 2012

<<http://www.pref.fukuoka.lg.jp/a04/mikonka-bankonka-houkokusyo.html>>

Japanese Law. Diunduh tanggal 9 Mei 2012.

<<http://www.japaneselawtranslation.go.jp/>>

Kiguchi, Junko. *Japanese Women's Rights at the Meiji Era*. Diunduh tanggal 16 Mei 2012.

<http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/17_syakai2.pdf>

Statistic of Japan. Diunduh tanggal 20 April 2012.

<<http://www.stat.go.jp>>

Undang-Undang Pendidikan Jepang 1947. Diunduh tanggal 27 April 2012

<<http://www.kyouiku-net.org/data/47kyoukihou.pdf>>



LAMPIRAN -LAMPIRAN

Tabel 1: Usia Rata-Rata pada Pernikahan Pertama

Tahun	Perempuan	Laki-Laki
1910	23.0	27.0
1915	23.2	27.4
1920	23.2	27.4
1925	23.1	27.1
1930	23.2	27.3
1935	23.8	27.8
1940	24.6	29.0
1945
1950	23.0	25.9
1955	23.8	26.6
1960	24.4	27.2
1965	24.5	27.2
1970	24.2	26.9
1975	24.7	27.0
1980	25.2	27.8
1985	25.5	28.2
1986	25.6	28.3
1987	25.7	28.4
1988	25.8	28.4
1989	25.8	28.5
1990	25.9	28.4
1991	25.9	28.4
1992	26.0	28.4
1993	26.1	28.4
1994	26.2	28.5
1995	26.3	28.5
1996	26.4	28.5
1997	26.6	28.5
1998	26.7	28.6
1999	26.8	28.7

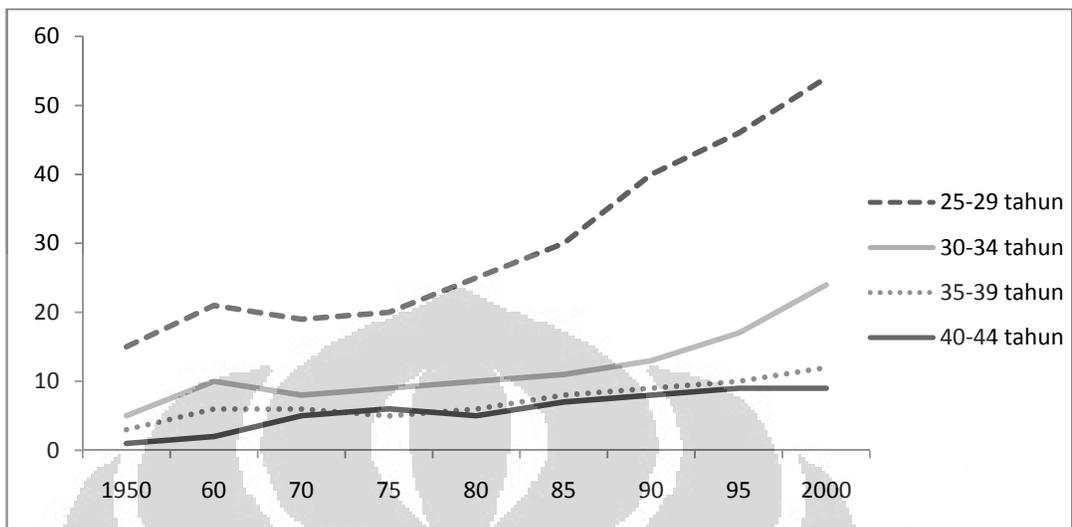
(lanjutan)

2000	27.0	28.8
2001	27.2	29.0
2002	27.4	29.1
2003	27.6	29.4
2004	27.8	29.6
2005	28.0	29.8
2006	28.2	30.0
2007	28.3	30.1
2008	28.5	30.2
2009	28.6	30.4

Sumber: Ministry of Health, Labor, and Welfare (2010)

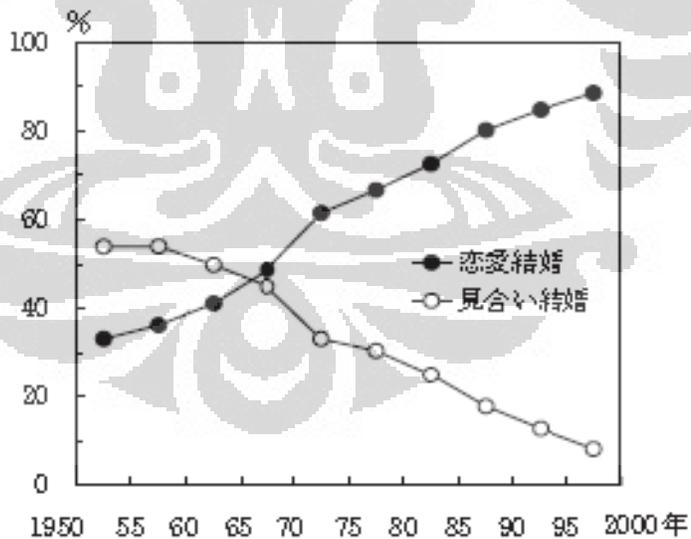


Grafik 1: Persentase Perempuan yang Belum Menikah (berdasarkan usia)



Sumber: Women's Data Book (2005), hal.11

Grafik 2: Perubahan *Mi'ai Kekkō* dan *Ren'ai Kekkō* (1950-2000)



Keterangan: ● *ren'ai kekkō* ○ *mi'ai kekkō*

Sumber: Journal of Population Problems (2007)

**Tabel 2: Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Usia dan Industri
(Februari 2012)**

dalam sepuluh ribu orang

	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49
Agriculture & Forestry					
Pertanian	5	4	5	4	5
Kehutanan	1	1	1	1	1
Non-Agriculture Industry					
Perikanan	1	1	1	1	1
Pertambangan	-	0	0	0	0
Konstruksi	24	44	55	49	43
Manufacturing	69	90	100	105	94
Listrik, Gas, Air	2	2	3	4	3
Informasi dan Komunikasi	25	23	27	22	16
Transportasi dan Pos	18	26	35	38	34
Grosir & Retail	52	52	69	58	54
Finance & Asuransi	6	5	11	15	10
Penelitian & Jasa Teknis profesional	8	11	17	16	14
Jasa Akomodasi, Makan, dan Minum	13	12	11	15	8
Jasa Rumah Tangga & Hiburan	9	9	12	11	9
Pendidikan	10	8	16	12	15
Kesehatan	25	24	22	21	13
Jasa gabungan	5	2	4	4	3
N.E.C	23	28	30	29	23
Pemerintahan	13	17	18	21	22

Sumber: <http://www.stat.go.jp>

Tabel 3: Persentase Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Usia

Tahun	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	Di atas 65
1985	16.6	71.9	54.1	50.6	60.0	67.9	68.1	61.0	51.0	38.5	15.5
1990	17.8	75.1	61.4	51.7	62.6	69.6	71.7	65.5	53.9	39.5	16.2
1991	17.8	75.6	63.2	52.9	62.1	70.4	72.1	66.5	55.5	40.7	16.6
1992	17.6	75.6	64.0	52.7	62.4	70.5	72.0	67.6	55.6	40.7	16.7
1993	17.4	74.5	64.3	52.7	61.7	70.3	71.9	66.9	56.4	40.1	16.0
1994	17.0	74.2	65.3	53.5	61.6	69.8	71.2	67.4	56.4	39.4	15.9
1995	16.0	74.1	66.4	53.7	60.5	69.5	71.3	67.1	57.0	39.7	15.6
1996	16.3	73.8	67.9	54.8	60.8	69.5	71.6	66.9	58.1	39.0	15.4
1997	16.8	73.4	68.2	56.2	62.3	70.9	72.2	67.9	58.7	39.8	15.4
1998	17.3	73.4	69.2	55.8	62.2	70.2	72.4	67.8	59.1	40.1	15.2
1999	16.8	72.4	69.7	56.7	61.5	69.5	71.8	67.9	58.7	39.7	14.9
2000	16.6	72.7	69.9	57.1	61.4	69.3	71.8	68.2	58.7	39.5	14.4
2001	17.5	72.0	71.1	58.8	62.3	70.1	72.7	68.2	58.4	39.5	13.8
2002	16.7	70.1	71.8	60.3	61.8	70.5	72.4	67.7	58.1	39.2	13.2
2003	16.6	69.4	73.4	60.3	63.1	70.3	72.5	68.1	58.9	39.4	13.0
2004	16.3	68.9	74.0	61.4	62.4	70.4	73.0	68.4	59.6	39.7	12.9
2005	16.5	69.8	74.9	62.7	63.0	71.0	73.9	68.8	60.0	40.1	12.7
2006	16.6	70.1	75.7	62.8	63.6	71.4	74.0	70.5	60.3	40.2	13.0
2007	16.2	69.5	75.8	64.0	64.3	72.0	75.6	70.8	60.8	42.2	12.9
2008	16.2	69.7	76.1	65.1	64.9	71.1	75.5	71.6	61.6	43.6	13.1
2009	16.2	70.2	77.2	67.2	65.5	71.7	75.3	72.5	62.5	44.6	13.1
2010	15.9	69.4	77.1	67.8	66.2	71.6	75.8	72.8	63.3	45.7	13.3

Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communications (2010)

Tabel 4: Persentase Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Pendidikan

Tahun	SMA	Akademi	Universitas
1950	35.7	-	45.2
1951	37.5	48.3	85.6
1952	41.1	42.4	81.2
1953	39.6	48.5	76.2
1954	39.6	49.2	72.8
1955	38.6	42.5	67.5
1956	43.6	43.6	56.7
1957	51.5	45.5	57.2
1958	52.1	43.9	59.1
1959	53.7	45.6	57.1
1960	58.6	49.8	64.1
1961	62.9	54.0	69.1
1962	63.9	52.2	70.0
1963	64.5	55.2	70.6
1964	66.7	58.9	71.0
1965	62.9	57.4	66.7
1966	59.7	54.0	61.9
1967	60.8	55.9	62.1
1968	61.1	59.9	64.0
1969	61.4	65.6	61.5
1970	61.2	68.8	59.9
1971	59.2	69.2	60.8
1972	56.5	69.3	57.9
1973	54.0	73.2	60.3
1974	51.6	75.6	63.9
1975	48.0	73.0	62.8
1976	45.2	68.9	57.6
1977	45.6	71.3	59.4
1978	45.8	70.9	60.2
1979	45.6	72.3	62.9

(lanjutan)

1980	45.6	76.4	65.7
1981	45.7	78.4	67.6
1982	45.6	78.1	69.2
1983	44.3	78.4	69.4
1984	43.7	79.6	70.7
1985	43.4	81.3	72.4
1986	41.5	82.2	73.4
1987	38.6	82.2	73.6
1988	37.7	83.0	75.2
1989	37.0	86.1	78.5
1990	36.2	88.1	81.0
1991	34.8	88.0	81.8
1992	32.9	86.8	80.4
1993	29.6	80.8	75.6
1994	26.0	70.7	67.6
1995	23.4	66.0	63.7
1996	21.9	66.5	63.5
1997	21.3	68.9	64.8
1998	20.5	67.0	64.5
1999	18.1	60.5	59.8
2000	16.5	57.4	57.1
2001	16.4	60.5	59.6
2002	15.1	61.6	60.0
2003	14.7	61.1	58.8
2004	14.7	63.2	59.7
2005	14.9	66.8	64.1

Sumber: Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (2005).

Tabel 5: Persentase Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Status Pernikahan

Tahun	Belum Menikah	Menikah	Janda/Cerai
1985	53.0	51.1	32.9
1986	53.3	51.1	32.4
1987	53.0	51.3	31.9
1988	53.3	51.6	31.7
1989	54.2	52.3	31.7
1990	55.2	52.7	32.3
1991	56.4	53.2	32.4
1992	57.4	52.9	32.7
1993	57.7	52.2	32.5
1994	58.4	51.8	32.3
1995	59.2	51.2	32.0
1996	60.4	51.0	31.7
1997	61.2	51.3	31.7
1998	61.9	50.6	32.0
1999	62.2	50.0	31.4
2000	62.2	49.7	31.0
2001	62.5	49.5	30.5
2002	62.0	48.8	29.8
2003	62.1	48.5	30.0
2004	62.3	48.5	29.6
2005	63.0	48.7	29.4
2006	63.7	48.5	29.9
2007	63.4	48.9	29.4
2008	63.4	48.8	29.5
2009	63.7	49.0	29.5
2010	63.4	49.2	29.5

Sumber: Ministry of Internal Affairs and Communications (2010)

Tabel 6: Persentase Perempuan yang Menempati Posisi Manajerial

Tahun	Direktur (<i>Buchou</i>)	Manajer (<i>Kachou</i>)	Kepala Staff (<i>Kakarichou</i>)
1980	1.0	1.3	3.1
1985	1.0	1.6	3.9
1990	1.1	2.0	5.0
1995	1.3	2.8	7.3
1996	1.4	3.1	7.3
1997	2.2	3.7	7.8
1998	2.0	3.2	8.1
1999	2.1	3.4	8.2
2000	2.2	4.0	8.1
2001	1.8	3.6	8.3
2002	2.4	4.5	9.6
2003	3.1	4.6	9.4
2004	2.7	5.0	11.0
2005	2.8	5.1	10.4
2006	3.7	5.8	10.8
2007	4.1	6.5	12.4
2008	4.1	6.6	12.7
2009	4.9	7.2	13.8
2010	4.2	7.0	13.7

Sumber: Ministry of Health, Labor, and Welfare